

JURNAL AKUNTANSI



DOI: <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1>

p-ISSN 2088 - 768X

e-ISSN 2540 - 9646

**VOLUME 5
NOMOR 1
JUNI 2017**

KINERJA KEUANGAN DAERAH PASCA PERALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Juliati
Arum Kusumaningdyah Adiati
Trisninik Ratih Wulandari

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Dewi Kusuma Wardani
Rumiyatun

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *DEFERRED TAX EXPENSE* TERHADAP *EARNINGS MANAGEMENT* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Sri Suranta
Rendi Rendi

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS

Teguh Erawati
Andrea Meylita Widyasti Parera

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* (PENGAMPUNAN PAJAK), DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN

Suyanto
Ika Septiani Putri

***FEE AUDIT* SEBAGAI MEDIASI PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA (ANALISIS JALUR)**

Widarti

PENGARUH *LOAN TO DEPOSIT RATIO*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, *RETURN ON ASSET* DAN *NON PERFORMING LOAN* TERHADAP *RETURN SAHAM*

Sri Ayem
Sri Wahyuni

**JURNAL AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

PENANGGUNGJAWAB

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Yogyakarta

PENANGGUNGJAWAB TEKNIS

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Yogyakarta

PEMIMPIN REDAKSI

Dewi Kusuma W, SE, S.Psi., M.Sc., Ak., CA

REDAKSI

Andri Waskita Aji, SE., M.Sc., Ak., CA., BKP
Sunarto, SE., MM
Sri Ayem, SE., M.Sc., Ak. CA
Teguh Erawati, SE., M.Sc
Yhoga Heru Pratama, SE

MITRA BESTARI

Atika Jauharia Hatta, STIE YKPN
Dody Hapsoro, STIE YKPN
Fauzan Misra, Universitas Andalas Padang
Hendrawan Santosa Putra, Universitas Jember
Maulana, Universitas Tamansiswa Palembang
Riha Dedi Priantana, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Sri Hermuningsih, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Alamat Redaksi:

Redaksi Jurnal Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Jl. Kusumanegara No. 121, Lt-2 Yogyakarta
e-mail: jurnalakuntansi.feust@gmail.com, Telp/Fax: (0274) 557455

Redaksi menerima artikel hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Redaksi berhak meringkas, mengurangi, dan memperbaiki format tulisan yang akan dimuat dalam jurnal tanpa mengubah substansi dari isi dan tulisan. Naskah diketik dalam format 2 (dua) spasi pada kertas A4, dengan garis tepi kiri 4, atas 4, kanan 3, dan bawah 3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Abstrak dengan bahasa Inggris bagi tulisan/karya ilmiah berbahasa Inggris. Panjang artikel antara 10 – 20 halaman (2500-5000 kata). Pengiriman harus menyertakan cetakan naskah hardcopy sebanyak 2 (dua) eksemplar dan menyertakan softcopy berupa CD. Penulis menyertakan biodata (Nama, Alamat, Alamat Kantor, No. Telp, e-mail). Penulis akan mendapatkan 2 eksemplar naskah yang diterbitkan. Naskah konseptual memuat komponen: Judul, Abstrak, Kata Kunci, Pendahuluan, Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis, Metodologi Penelitian, Pembahasan, Kesimpulan-Implikasi-Saran-Keterbatasan, dan Daftar Pustaka.

JURNAL AKUNTANSI



DOI: <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1>

p-ISSN 2088 - 768X

e-ISSN 2540 - 9646

**VOLUME 5
NOMOR 1
JUNI 2017**

KINERJA KEUANGAN DAERAH PASCA PERALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Juliati
Arum Kusumaningdyah Adiati
Trisninik Ratih Wulandari

PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Dewi Kusuma Wardani
Rumiyatun

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *DEFERRED TAX EXPENSE* TERHADAP *EARNINGS MANAGEMENT* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Sri Suranta
Rendi Rendi

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS

Teguh Erawati
Andrea Meylita Widyasti Parera

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* (PENGAMPUNAN PAJAK), DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN

Suyanto
Ika Septiani Putri

***FEE* AUDIT SEBAGAI MEDIASI PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA (ANALISIS JALUR)**

Widarti

PENGARUH *LOAN TO DEPOSIT RATIO*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, *RETURN ON ASSET* DAN *NON PERFORMING LOAN* TERHADAP *RETURN SAHAM*

Sri Ayem
Sri Wahyuni

EDITORIAL

JURNAL AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah terbit Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta Vol. 5 No. 1. Fakultas Ekonomi khususnya program studi Akuntansi sangat berbahagia dapat secara konsisten menerbitkan jurnal akuntansi.

Program studi akuntansi ternyata di tahun 2013 dapat melangkah konsisten dalam menerbitkan jurnal akuntansi dengan jumlah sama, semoga dimasa mendatang masih dapat berjalan sukses dan lancar. Semangat giat belajar sepanjang hayat menjadikan kontribusi mahasiswa dan dosen dapat melakukan semangat maju dari sisi karya ilmiah.

Maju dengan niat ilmu sebagai panglima cukup membawa angin segar, layar perubahan sudah berkembang. Potensi Fakultas dan Program Studi mendukung, semoga menjadi hari-hari yang membahagiakan semua pihak.

Pelajaran yang diperoleh melalui karya ilmiah ini adalah, apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat adalah niat yang besar yakni Maju Bersama Ekonomi Kerakyatan Berasaskan Ajaran Hidup Tamansiswa mulai ada titik terang karena mau bekerja sama.

Terima kasih yang telah mendukung, ramai-ramai maju bersama melalui Fakultas Ekonomi dengan menjadi masyarakat ilmiah yang terus berjuang menjadi manusia kritis dengan menulis di Jurnal Akuntansi.

Selamat Berjuang

Yogyakarta, Juni 2017
Redaksi Jurnal Akuntansi

DAFTAR ISI
JURNAL AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA

KINERJA KEUANGAN DAERAH PASCA PERALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	1
Juliati Arum Kusumaningdyah Adiaty Trisninik Ratih Wulandari	
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMBAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	15
Dewi Kusuma Wardani Rumiyatun	
PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA	25
Rendi Sri Suranta	
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	37
Andrea Meylita Widyasti Parera Teguh Erawati	
PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK), DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN	49
Suyanto Ika Septiani Putri	
FEE AUDIT SEBAGAI MEDIASI PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA (ANALISIS JALUR)	57
Widarti	
PENGARUH LOAN TO DEPOSIT RATIO, CAPITAL ADEQUACY RATIO, RETURN ON ASSET, DAN NON PERFORMING LOAN TERHADAP RETURN SAHAM.....	71
Sri Ayam Sri Wahyuni	



KINERJA KEUANGAN DAERAH PASCA PERALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Juliati*

**Arum Kusumaningdyah Adiati
 Trisninik Ratih Wulandari**

Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret

*email: juliati.qodrian@gmail.com

ABSTRACT

This study examined differences in the local government's financial performance before and after the transition from central tax BPHTB to local taxes? In general, this study aims to determine the contribution BPHTB to the PAD as a source of funding for the survival of each region in order to achieve local autonomy system. The samples used in this study is the district/city that has existed since autonomy BPHTB not be treated as 114 cities/districts. The realization of the study observation period is the period before the transition budget BPHTB (Year 2010) and after the transition BPHTB (Year 2011). The research data were statistically tested with a different test of two paired samples.

The results show that the performance of local government in Java have differences before and after the transition BPHTB from the central government to local governments. This research can provide empirical evidence of the differences in the financial performance of the post-transition region from the center to the regions BPHTB especially Java. The results of this study can also be used as a reference in future studies with similar themes to consider several things. First, the use of samples that are not confined to the local government but the entire Indonesian island of Java. Second, adding the growth rate ie performance measurement. Third, review the compatibility ratio because in addition to operational expenditure and capital expenditure is no longer heading in the budget expenditure is financing and transfer.

INFO ARTIKEL

Diterima: 31 Maret 2017

Direview: 18 April 2017

Disetujui: 8 Juni 2017

Terbit: 13 Juni 2017

Keywords:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Financial Performance, Autonomous Region.

PENDAHULUAN

Pembangunan yang terus berjalan mengharapakan perubahan yang bisa mengarahkan kepada perbaikan sistem yang telah dilaksanakan. Salah satu perbaikan sistem

yang dilakukan pemerintah sejak reformasi yaitu otonomi daerah yang dilaksanakan sejak tahun 1999. Otonomi daerah merupakan sistem desentralisasi pemerintahan supaya setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan sendiri untuk

mengelola daerahnya. Pada kenyatannya, pelaksanaan otonomi daerah ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena setelah lebih dari satu dasawarsa masih banyak problematika pelaksanaan otonomi daerah. Problematika yang menjadi bahan renungan adalah ketidaksiapan pemerintah daerah dalam membiayai wilayahnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Otonomi daerah yang terus berjalan tetap menjadi tugas pemerintah dalam perbaikan sistem. Perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui peraturan tentang Keuangan Daerah. Dalam peraturan tersebut, pemerintah mengharapkan setiap daerah mampu membuat laporan neraca yang menggambarkan kekayaan daerah, sumber pendanaan serta laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menggambarkan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Dana yang diperoleh dari pemerintah pusat serta surplus atau defisit yang dialami oleh suatu daerah, sehingga laporan tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 menggantikan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah prospek cerah bagi daerah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Sebagai contoh, setelah dikelola sejak 1 Januari 2011, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi faktor utama dibalik meningkat tajamnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surakarta. Pada tahun pertama masuknya BPHTB (tahun 2011), pemerintah kota Surakarta menerima PAD yang awalnya sebesar Rp.114.329.357.815 meningkat menjadi Rp.176.176.060.000. Sedangkan pendapatan pajak daerah, pada tahun 2010 kota Surakarta sebesar Rp.54.423.668.000, tahun 2011 meningkat menjadi Rp.102.241.123.000 sehingga kontribusi BPHTB sebesar Rp.34.500.000.000. Dengan demikian, prosentase kenaikan pendapatan pajak daerah dari pemungutan BPHTB sebesar 88% dan jika tanpa kontribusi dari BPHTB, kenaikan pajak daerah kota Surakarta hanyalah mencapai 24%. Hal inilah yang menjadi **motivasi** penelitian,

sehingga dapat diketahui perkembangan kondisi setelah adanya kebijakan BPHTB tersebut.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan rasio-rasio tertentu dari Analisis Laporan Keuangan Daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan sampai pada tingkatan manakah pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan pembelanjanya. Peralihan BPHTB sebagai pajak pusat menjadi pajak daerah, tentu akan mengubah kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, **pertanyaan penelitian** ini adalah bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah adanya peralihan BPHTB menjadi pajak daerah? Apakah ada perbedaan kinerja setelah peralihan BPHTB tersebut? **Tujuan** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi BPHTB ke PAD sebagai salah satu sumber pendaan bagi pembiayaan pemerintah daerah yang berkontribusi memperlancar kegiatan otonomi daerah.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan **manfaat** bagi berbagai pihak berikut ini. Pertama, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dengan tema sejenis yaitu kinerja keuangan daerah hubungannya dengan BPHTB. Kedua, hasil penelitian bisa digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah terutama mengenai pengelolaan keuangan daerah dan pajak BPHTB.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Otonomi Daerah

Definisi otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 (5) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur yang membentuk otonomi daerah adalah sebagai berikut.

Kewenangan Otonomi Luas

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang

pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama serta kewenangan dibidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

Otonomi yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 (tiga) dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu sebagai berikut.

- 1) Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 3) Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria penting lainnya untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur

dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Pasal 1, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, maka keuangan daerah digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan mengelola keuangan daerah, sebagai berikut ini (Nataluddin, 2001:167).

- 1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167).

- 1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- 2) Ketergantungan pada bantuan pusat harus minimal agar PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh

kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besarnya belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisis atas laporan tersebut merupakan informasi yang penting agar bisa membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah sehingga menunjukkan kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22).

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan "Hubungan Situasional" dalam pelaksanaan

otonomi daerah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:168-169).

- 1) Pola Hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola Hubungan Konsultif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- 4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan melalui tabel 1.

Tabel 1
Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Tingkat Perkembangan	Pola Hubungan	Tingkat Kesiapan Otonomi Daerah
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif	Sangat Rendah
Rendah	25%-50%	Konsultatif	Rendah
Sedang	50%-75%	Partisipatif	Sedang
Tinggi	75%-100%	Delegatif	Tinggi

Sumber: Abdul Halim (2002:169)

Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD diukur dengan menggunakan rumus berikut ini.

1) Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan pajak retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan

daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Abdul Halim, 2007: 232). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

Rasio Kemandirian :

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi resiko kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Jadi, semakin tinggi rasio Kemandirian, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan.

Tabel 2
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Perkembangan	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: (Abdul Halim, 2007: 234)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t

TPD_t = Total Penerimaan Daerah Tahun t

3) Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.

Tabel 3
Skala Interval Indeks Kemampuan Rutin

%	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 - 20,00	Sangat Kurang
20,01 - 40,00	Kurang
40,01 - 60,00	Cukup
60,01 - 80,00	Baik
80,01 - 100	Sangat Baik

Sumber : (Abdul Halim, 2007: 234)

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Kemampuan Rutin.

$$IKR = \frac{PAD}{Total\ Belanja\ APBD} \times 100\%$$

Keterangan:

IKR = Indeks Kemampuan Rutin

PAD = Pendapatan Asli Daerah

4) Rasio Kecerasingan

Rasio Kecerasingan adalah rasio untuk melihat keserasian antara belanja rutin terhadap APBD dan keserasian antara belanja pembangunan terhadap APBD. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk belanja rutin berarti prosentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rumus rasio keserasian adalah sebagai berikut (Abdul Halim, 2007:235).

- Rasio Belanja Rutin:

$$= \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

- Rasio Belanja Pembangunan:

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$$

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Pertumbuhan APBD dilihat dari berbagai komponen penyusun APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan (Abdul Halim, 2007:241).

Kondisi yang menunjukkan semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah dan Belanja Pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah, dan Belanja Rutin yang diikuti semakin rendahnya Belanja Pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan belum mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Semakin tinggi rasio pertumbuhan, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Gambar 1 menunjukkan kerangka konseptual masa sebelum dan setelah peralihan BPHTB.

Pengembangan Hipotesis

BPHTB yang beralih menjadi pajak daerah tentu akan meningkatkan PAD bagi daerah. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yang tercermin dari rasio keuangan. Oleh karena itu hipotesis yang

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1: Terdapat perbedaan kinerja keuangan setelah adanya peralihan BPHTB dari pusat ke daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/ kota di Pulau Jawa dengan metode pengumpulan data secara purposive sampling, yaitu sampel diperoleh dengan menggunakan kriteria tertentu, maka diperlukan suatu karakter yakni kabupaten/ kota yang sudah ada sejak otonomi BPHTB belum diperlakukan.

Data tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kabupaten/ kota sebagai dasar perhitungan kinerja keuangan untuk periode

sebelum dan setelah peralihan BPHTB ke daerah berasal dari Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah setiap tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan data tersebut diperoleh dari Laporan Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (DJPKPD). Periode pengamatan penelitian atas realisasi APBD adalah periode sebelum peralihan BPHTB (Tahun 2010) dan setelah peralihan BPHTB (Tahun 2011).

Definisi Variabel dan Pengukurannya

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan perbandingan kinerja antara dua sampel (sampel tidak bebas) dengan menggunakan alat uji statistik berupa uji beda. Dengan demikian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa parameter pengukuran yang berupa ratio pada tabel 4.

Tabel 4
Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran
1.	Rasio Kemandirian Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern}}$
2.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan.	$\text{DDF} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$ <p>Keterangan: DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal PADt = Total Pendapatan Asli Daerah Tahun t TPDt = Total Penerimaan Daerah</p>

		Tahun t
3.	Rasio Indeks Kemampuan Rutin	<p>Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya.</p> $IKR = \frac{PAD}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$ <p>Keterangan: IKR = Indeks Kemampuan Rutin PAD = Pendapatan Asli Daerah</p>
4.	Rasio Keserasian	<p>Rasio keserasian adalah rasio untuk melihat keserasian antara belanja rutin terhadap APBD dan keserasian antara belanja pembangunan terhadap APBD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rasio Belanja Rutin: $\frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBD}}$ • Rasio Belanja Pembangunan: $\frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja APBD}}$
5.	Rasio Pertumbuhan	<p>Rasio pertumbuhan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya.</p> $r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$ <p>Keterangan: P_n = Data yang dihitung pada tahun ke n P_o = Data yang dihitung pada tahun ke 0 R = Pertumbuhan</p>

Metode Analisis Data

Data penelitian ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis terlebih dahulu dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak normal. Hal ini karena normalitas diperlukan sebagai prasyarat untuk uji beda dari dua sampel yang berpasangan. Untuk mendeteksi normalitas data penelitian ini menggunakan uji nonparametrik yaitu Kolmogorov-Smirnov.

HASIL DAN PEMBAHASAN Sampel

Penelitian ini mengambil Pulau Jawa sebagai sampel penelitian karena Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang paling maju dalam hal pembangunan dan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010 dan tahun 2011 dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi yang ada di Pulau Jawa yaitu 117 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, terdapat tiga kabupaten yang belum ditemukan laporan realisasi anggaran untuk tahun 2010 yaitu Kota Depok, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, sehingga jumlah pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 114 pemerintah daerah. Adapun jumlah pemerintah daerah dari setiap provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat di tabel 5.

Tabel 5
Sampel Penelitian

No	Provinsi	Jumlah Pemda
1	DKI Jakarta	1
2	Jawa Barat	25
3	Jawa Tengah	34
4	Yogyakarta	6
5	Jawa Timur	39
6	Banten	9
Total		114

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa mean dari rasio kemandirian untuk tahun 2010 adalah 0,233 sedangkan untuk tahun 2011 meningkat menjadi 0,290. Sementara mean rasio derajat desentralisasi fiskal juga mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu 0,130 menjadi 0,152. Mean rasio indeks kemampuan rutin juga mengalami peningkatan yaitu 0,184 pada tahun 2010 dan 0,212 untuk tahun 2011. Mean rasio keserasian untuk belanja operasional mengalami penurunan dari tahun 2010 ke tahun 2011 yaitu dari 0,843 menjadi 0,832 sedangkan untuk mean rasio keserasian belanja modal mengalami peningkatan yaitu dari 0,134 pada tahun 2010 menjadi 0,146 pada tahun 2011.

Nilai maksimum untuk rasio kemandirian yaitu 3,429 pada tahun 2011 dan 2,940 untuk tahun 2010. Nilai maksimum rasio tersebut merupakan nilai rasio dari Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jatim untuk tahun 2011 dan Pemprov Jabar untuk tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rasio suatu pemda, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam membiayai sendiri daerahnya. Pemprov Jatim dan Jabar mengalami peningkatan rasio kemandirian dari tahun 2010 ke tahun 2011 sehingga ada peningkatan kemampuan dalam membiayai daerahnya. Nilai minimum untuk rasio kemandirian pada tahun 2011 sebesar 0,001 sedangkan pada tahun 2010 sebesar 0,02. Pemda yang memiliki nilai rasio kemandirian terendah pada tahun 2011 adalah Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banten sedangkan untuk tahun 2010 adalah Pemkab Cimahi. Pemkab Banten mengalami penurunan nilai rasio kemandirian dari tahun 2010 ke tahun 2011, sehingga kemampuan dalam membiayai

daerahnya sendiri mengalami penurunan. Sedangkan Pemkab Cimahi mengalami peningkatan dalam rasio kemandirian dari tahun 2010 ke tahun 2011.

Nilai maksimum untuk rasio derajat desentralisasi fiskal yaitu 0,774 untuk tahun 2011 dan 0,746 untuk tahun 2010. Nilai tersebut diperoleh dari Pemprov Jabar baik untuk tahun 2010 maupun tahun 2011. Pemprov Jabar memiliki kenaikan nilai rasio derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan bahwa Pemprov Jabar memiliki kemampuan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan di daerahnya. Menurut Halim (2007), nilai tersebut menunjukkan Pemprov Jabar memiliki kemampuan yang sangat baik. Nilai minimum untuk tahun 2011 sebesar 0,001 dan untuk tahun 2010 sebesar 0,019. Pemda yang memiliki nilai rasio untuk tahun 2011 adalah Pemkab Serang sedangkan untuk tahun 2010 adalah Pemkab Cimahi. Pemkab Serang mengalami penurunan dalam kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan. Menurut Halim (2007), nilai tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam hal keuangan daerah.

Nilai maksimum untuk rasio indeks kemampuan rutin pada tahun 2011 sebesar 1,511 dan 1,832 untuk tahun 2010, terjadi penurunan dalam nilai maksimum untuk rasio indeks kemampuan rutin dari tahun 2010 ke tahun 2011. Adapun daerah yang memiliki rasio indeks kemampuan rutin maksimum pada tahun 2011 adalah Pemprov Jateng dan untuk tahun 2010 adalah Pemprov Banten. Menurut Halim (2007), nilai tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membiayai pengeluaran operasional di

daerahnya. Nilai minimum untuk rasio indeks kemampuan rutin pada tahun 2011 sebesar 0,0384 dan tahun 2010 sebesar 0,0334. Untuk tahun 2011, nilai minimum terdapat pada Pemkab Tasikmalaya dan tahun 2010 pada Pemkab Ngawi. Menurut Halim (2007), daerah tersebut memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran di daerahnya.

Nilai maksimum untuk rasio keserasian biaya operasional untuk tahun 2010 sebesar 1,000 yang diperoleh oleh Pemkot Tegal,

sedangkan tahun 2011 sebesar 0,935 diperoleh Pemkot Yogyakarta. Nilai maksimum untuk rasio keserasian biaya modal tahun 2011 sebesar 0,327 diperoleh Pemkot Tangerang Selatan sedangkan tahun 2010 sebesar 0,291 diperoleh Pemprov Banten. Nilai minimum untuk rasio keserasian biaya operasional pada tahun 2011 sebesar 0,473 diperoleh Pemprov Jateng sedangkan tahun 2010 sebesar 0,447 diperoleh Pemprov Banten. Nilai minimum untuk rasio keserasian biaya modal untuk tahun 2010 sebesar 0,038 diperoleh Pemkab Batang dan tahun 2011 sebesar 0,06 diperoleh Pemkot Yogyakarta.

Tabel 6
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RK2011	114	.001643283919	3.429458005882	.27686933779175	.613560901165914
RK2010	114	.019731903968	2.940046761315	.23344406194461	.529024231474385
RDDF2011	114	.001640587967	.774238744634	.14708184770826	.156692328991755
RDDF2010	114	.019350089853	.746195905638	.13052993659897	.144816322581110
RIKR2011	114	.038487807986	1.511079378062	.20702861627541	.275760823853968
RIKR2010	114	.033430030042	1.832305339293	.18475436436566	.287784599833798
RK120011	114	.4735	.9350	.832187	.0751171
RK12010	114	.447023200139	1.000000000000	.84360953268478	.086463891189030
RK22011	114	.059707415764	.327673878246	.14617475001979	.054756214390315
RK22010	114	.038439186115	.291600678178	.13405825262020	.056465966231685
Valid N (listwise)	114				

Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menguji apakah terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin dan rasio keserasian setelah adanya

peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hasil pengujian menggunakan SPSS 16.0 dengan alat uji paired sample t-test menunjukkan hasil sebagai berikut pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Pengujian Hipotesis

Jenis Rasio	Nilai t	Signifikansi
Rasio Kemandirian	4,211	0,000
Rasio DDF	4,716	0,000
Rasio IKR	3,472	0,000
Rasio Keserasian-BO	-2,164	0,033
Rasio Keserasian-BM	2,839	0,005

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki perbedaan sebelum dan setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hasil tersebut diperoleh dengan melihat signifikansi dari setiap rasio, yaitu rasio kemandirian yang memiliki nilai t 3,502 dan nilai signifikansi 0,001, rasio derajat desentralisasi fiskal yang memiliki nilai t 3,687 dan nilai signifikansi 0,000, rasio indeks kemampuan rutin yang memiliki nilai t 3,302 dan nilai signifikansi 0,033, rasio keserasian untuk biaya operasional memiliki nilai t -2,164 dan nilai signifikansi 0,033 serta rasio keserasian untuk biaya modal memiliki nilai t sebesar 2,839 dan nilai signifikansi 0,005. Untuk setiap rasio nilai signifikansi kurang dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa setiap rasio menunjukkan nilai t yang positif kecuali untuk nilai t untuk rasio keserasian biaya operasional yang menunjukkan nilai negatif, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang tercermin dari rasio keserasian biaya operasional mengalami penurunan, artinya bahwa biaya operasional yang digunakan sebelum adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar daripada biaya operasional setelah adanya peralihan. Sedangkan keempat rasio yang lain mengalami peningkatan setelah terjadinya peralihan BPHTB.

Interpretasi Hasil Pengujian

Hipotesis penelitian ini dinyatakan dapat diterima dengan menggunakan alat uji paired sample t -tes, karena nilai signifikansi dari setiap rasio kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada tahun 2011.

Rasio yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian biaya operasional dan rasio keserasian untuk biaya modal. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan

tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) diantaranya melalui Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Abdul Halim, 2007: 232). Rata-rata rasio kemandirian pemerintah daerah di Pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah daripada sumber pendapatan dari pihak ekstern. Peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah, karena BPHTB telah menjadi pajak daerah. Peningkatan kemandirian tertinggi dicapai oleh Pemkot Surabaya dengan peningkatan sebesar 58% dari tahun 2010 ke tahun 2011, sedangkan penurunan kemandirian tertinggi terjadi pada Pemkab Serang dengan penurunan sebesar 16%.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Peralihan BPHTB bisa menjadi salah satu upaya untuk menurunkan campur tangan pemerintah. Dari hasil statistik deskriptif menunjukkan adanya peningkatan rasio derajat desentralisasi fiskal, peningkatan rasio tertinggi dicapai oleh Pemkot Surabaya dengan peningkatan sebesar 20%, sementara penurunan tertinggi dialami oleh Pemkab Serang dengan penurunan sebesar 14%, rata-rata peningkatan rasio pemerintah daerah di pulau Jawa sebesar 2%. Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah berubah setelah adanya peralihan BPHTB yang diukur melalui rasio derajat desentralisasi fiskal

memberikan arti bahwa peralihan BPHTB merupakan salah satu cara untuk mengurangi campur tangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Akan tetapi, menurut Halim (2007) rasio derajat desentralisasi fiskal dikatakan baik, jika berada pada range 0,4-0,5. Mean dari rasio derajat desentralisasi fiskal untuk tahun 2010 adalah 0,13 dan tahun 2011 adalah 0,15 sehingga walaupun terjadi peningkatan rasio derajat desentralisasi fiskal tetapi belum bisa dikatakan baik masih dalam skala kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah pusat sepertinya perlu memindahkan pajak-pajak pusat ke pajak daerah agar ketergantungan daerah terhadap pusat semakin rendah.

Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin yang menggambarkan besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya. Semakin tinggi rasio Indeks Kemampuan Rutin, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah. Hasil pengujian hipotesis menyebutkan bahwa kinerja pemerintah daerah berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki perbedaan dengan kinerja sebelum adanya pemerintah. Dari hasil statistik deskriptif juga menunjukkan adanya peningkatan mean dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran rutin dari pendapatan asli daerah semakin meningkat. Berdasarkan skala indeks kemampuan rutin dalam Halim (2007), pada tahun 2010 kinerja pemerintah dalam membiayai pengeluaran rutin berada pada kategori sangat kurang sedangkan tahun 2011 berada pada kategori kurang. Oleh karena itu, peralihan BPHTB masih belum bisa membuat kinerja indeks kemampuan rutin menjadi lebih baik. Sebagian besar pemerintah daerah memiliki kinerja yang meningkat untuk indeks kemampuan rutin, tetapi ada pula yang mengalami penurunan. Fenomena yang menarik terdapat pada Provinsi Banten, pemprov tersebut memiliki indeks kemampuan rutin yang tertinggi pada tahun 2010 tetapi rasio tersebut menurun drastis pada tahun 2011 yaitu menurun

sebesar 0,5, penurunan yang cukup besar. Rata-rata kenaikan indeks kemampuan rutin hanya sebesar 0,02. Akan tetapi, Pemprov Banten justru mengalami penurunan yang cukup besar. Hal tersebut karena terjadi kenaikan biaya operasional yang cukup besar pada tahun 2011 yaitu kenaikan sebesar 100%. Pemerintah daerah yang mengalami kenaikan rasio indeks kemampuan rutin tertinggi adalah Pemkab Tangerang Selatan. Biaya operasional Pemkab Tangerang selatan memang menurun dari tahun 2010 ke tahun 2011.

Rasio keserasian adalah rasio untuk melihat keserasian antara belanja rutin terhadap APBD dan keserasian antara belanja pembangunan terhadap APBD. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk belanja rutin berarti prosentase belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun belanja pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rasio keserasian untuk biaya operasional merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan total biaya APBD, sedangkan rasio keserasian untuk biaya pembangunan merupakan total biaya modal dibandingkan dengan total biaya APBD. Rasio keserasian untuk biaya operasional di Pulau Jawa diantara 60-90% dari total biaya APBD sedangkan untuk rasio keserasian biaya modal diantara 10-40% dari total biaya APBD. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya operasional yang bersifat rutin lebih besar daripada biaya modal yang merupakan biaya pembangunan. Dari hasil pengujian hipotesis dinyatakan terdapat perbedaan kinerja antara rasio keserasian setelah adanya peralihan BPHTB ke pemerintah daerah. Dari rata-rata rasio keserasian terdapat peningkatan pada rasio belanja modal, sedangkan pada rasio belanja operasional menunjukkan adanya penurunan. Hal ini bisa dikatakan bahwa pada tahun 2011 belanja modal mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. Penurunan rasio keserasian

untuk belanja modal tertinggi adalah Pemkot Surabaya sedangkan peningkatan rasio keserasian untuk belanja modal tertinggi adalah Pemkot Banjar. Sedangkan untuk rasio keserasian untuk belanja operasional peningkatan rasio tertinggi adalah Pemkot Pekalongan dan penurunan rasio tertinggi adalah Pemkot Tegal. Pemerintah daerah di Pulau Jawa masih memiliki rasio keserasian untuk belanja operasional yang lebih tinggi dibandingkan untuk rasio keserasian belanja modal. Belanja di APBD masih didominasi oleh belanja-belanja yang sifatnya rutin, sedangkan untuk pembangunan masih relatif kecil.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dilihat dari rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin dan rasio keserasian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa memiliki perbedaan sebelum dan setelah adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan terdapat perbedaan kinerja pemerintah daerah sebelum dan sesudah peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat diterima. Hasil pengujian tersebut juga menunjukkan bahwa setiap rasio nilai t hasilnya positif kecuali untuk nilai t rasio keserasian biaya operasional yang menunjukkan nilai negatif, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah yang tercermin dari rasio keserasian biaya operasional mengalami penurunan, artinya bahwa biaya operasional yang digunakan sebelum adanya peralihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lebih besar daripada biaya operasional setelah adanya peralihan. Sedangkan keempat rasio yang lain mengalami peningkatan setelah terjadinya peralihan BPHTB.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil analisis data. Keterbatasan pertama adalah penelitian ini

menggunakan sampel kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa sehingga generalisasi hasil penelitian hanya terbatas pada wilayah tersebut. Namun demikian, penggunaan sampel pada wilayah tertentu ini dipilih karena dapat digunakan untuk mengendalikan pengaruh karakteristik wilayah yang berbeda-beda terhadap hasil penelitian.

Keterbatasan kedua adalah penelitian ini hanya menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dari sudut pandang pasca peralihan BPHTB pusat ke daerah sehingga generalisasi hasil penelitian hanya terbatas pada perubahan sistem tersebut. Meskipun demikian, penggunaan masa peralihan BPHTB sebagai periode pengamatan penelitian ini dipilih karena dapat mengurangi kemungkinan pengaruh “kemungkinan faktor-faktor/ kebijakan lainnya” pada hasil analisis.

Implikasi

Penelitian ini dapat memberi bukti empiris tentang perbedaan kinerja keuangan daerah pasca peralihan BPHTB dari pusat ke daerah khususnya Pulau Jawa. Hasil studi ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema sejenis, misalnya dengan mempertimbangkan:

1. penggunaan sampel yang tidak hanya pemerintah daerah di Pulau Jawa tetapi seluruh Indonesia;
2. menambahkan pengukuran kinerja misalnya rasio pertumbuhan; dan
3. menelaah kembali rasio keserasian karena selain untuk belanja operasional dan belanja modal masih ada lagi pos dalam pengeluaran APBD yaitu pembiayaan dan transfer.

REFERENSI

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ash Shiddiqy, Mohammad Hasby. 2012. *Analisis Perkembangan Kemampuan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

- Negeri Yogyakarta (Tidak Dipublikasikan). <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-keuangan-daerah-makalah.html>.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-otonomi-daerah-makalah.html>.
- Natalludin. 2001. Potensi Dana Perimbangan Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nirzawan. 2001. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pranicha, Herlin. 2011. Analisis Rasio Keuangan APBD Tahun 2006-2009 Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Tugas Akhir Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta (Tidak Dipublikasikan).
- Prastowo, Dwi D. dan Rifka Julianti. 2002. Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Yuliati. 2001. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.



PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)

Dewi Kusuma Wardani*
 Rumiayatun

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
 *email: dewifeust@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of knowledge of the taxpayer, the taxpayer awareness, motor vehicle tax penalties, and the system of samsat drive thru on tax compliance in the motor vehicle in samsat Bantul. The data that is used in this study are primary data from the results of questionnaires. Respondents in this study are the taxpayer automobiles that make tax payments in the system samsat drive-thru. The questionnaire was distributed to 110 respondents and data that can be processed are 100 questionnaires. The sampling method used accidental sampling. The data analysis techniques in this study used multiple linear regression techniques. Results of regression analysis showed that the awareness of taxpayers and system of samsat drive-thru has positive effect on tax compliance motor vehicle while knowledge of taxpayers and tax penalties vehicle had no significant effect on tax compliance vehicle.

INFO ARTIKEL

Diterima: 31 Maret 2017
 Direview: 18 April 2017
 Disetujui: 12 Juni 2017
 Terbit: 13 Juni 2017

Keywords:

Knowledge taxpayer, taxpayer awareness, tax penalties motor vehicles, and drive-thru samsat systems, motor vehicle tax compliance.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013).

Pada perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya selalu bertambah, tentunya

dapat dimanfaatkan oleh kantor samsat untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, tapi dilihat dari data yang ada masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya maka pemerintah tidak bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor ini apabila terdapat beberapa kendala yaitu

diantaranya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Samsat Bantul Periode 2011-2015.

Tabel 1 Data Penunggakan WP PKB Samsat Bantul Periode 2011-2015

Tahun	Jumlah WP PKB	WP yang Menunggak
2011	296.669	5
2012	326.964	1
2013	354.257	7
2014	373.292	11
2015	391.471	29

Sumber : Kantor Samsat Bantul, data diolah 2016

Berdasarkan pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 terjadi penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bantul yang berjumlah 5 wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pada tahun 2012 terjadi penunggakan kendaraan yang hanya berjumlah 1 wajib pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2013 terjadi penunggakan kendaraan yang berjumlah 7 wajib pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2014 terjadi penunggakan kendaraan 11 wajib pajak kendaraan bermotor, dan pada tahun 2015 terjadi penunggakan kendaraan 29 wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil tersebut maka perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, terutama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Bantul.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016). Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2014).

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib

pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013).

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015).

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2013).

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih meningkat pihak samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah peningkatan pelayanan publik (Affandi, 2008). Unit pelayanan samsat drive thru merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Masyarakat tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis (Mawardi, 2011).

Pada penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Jati dan Putri (2012). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu Ilhamsyah

dkk., (2016), Jatmiko (2006), Utomo (2011), Utama (2012), Budiarta dan Susilawati (2013), Suardana dan Dharma (2014), dan Isyatir (2015) dan terdapat penelitian terdahulu yang tidak mendukung penelitiannya yaitu Ummah (2015), Irianingsih (2012), dan Sari (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menambahkan variabel independen yaitu sistem samsat drive thru. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini akan mengangkat pembahasan mengenai **“Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)”**

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Carolina (2009) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertidak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu Ilhamsyah dkk., (2016) dan Ihsan (2013) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban

membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Susilawati dan Budiarta, 2013). Hasil Penelitian Susilawati dan Budiarta (2013) dan Ilhamsyah dkk., (2016) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (isyatir, 2015). Pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah tingkah laku yang tidak dikendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Sari dan Susanti, 2015).

Penelitian Utama (2012), Ilhamsyah dkk., (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem samsat drive thru adalah layanan pengesahan STNK, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat yang tempatnya di luar gedung kantor bersama Samsat dan memungkinkan pemilik kendaraan melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan

bermotor yang dikendarainya (Rahmawati, 2013).

Semakin banyaknya pengguna sistem samsat drive thru maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian yang dilakukan Rahmawati (2013) menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui sistem samsat drive thru sangat efektif. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sistem Samsat Drive Thru berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang terdaftar di Samsat drive thru Bantul. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik metode Accidental Sampling. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor roda empat. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak yang ditemui di Kantor Samsat Drive Thru

Bantul, tempat wajib pajak membayar pajaknya. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden yaitu skala likert 5 point.

Pengembangan Instrumen Penelitian

Peneliti mengembangkan instrumen penelitian dengan mendefinisikan operasional variabel dan menurunkan pernyataan dari indikator. Pilot test dilakukan dan menguji validitas dan reliabilitas. Berikut instrumen penelitian ini:

a. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Ilhamsyah dkk., (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi yaitu memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajaknya tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya, dan wajib pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Indikator	Pernyataan
1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya	2. Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya	3. Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran	4. Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor

b. Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Carolina (2009) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak

dan kewajibannya dibidang perpajakan. Ihsan (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak memenuhi pengetahuan tentang fungsi pajak, pengetahuan prosedur

pembayaran, pengetahuan sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak.

Indikator	Pernyataan
1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1. Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya	2. Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkannya	3. Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.	4. Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat DIY

c. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Susilawati dan Budiarta (2013) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan

pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak meliputi kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak, kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara, dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela.

Indikator	Pernyataan
1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.	1. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah.	2. Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela	3. Saya sering lupa mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak
	4. Saya selalu menyiapkan alokasi dana untuk pembayaran pajak

d. Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X3)

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti dan/atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak kendaraan bermotor diatur dalam UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak kendaraan bermotor memenuhi wajib pajak mengetahui tujuan sanksi, pengenaan sanksi yang cukup berat untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi dikenakan pada wajib pajak yang melanggar.

Indikator	Pernyataan
1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.	1. Sanksi sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak	2. Saya selalu terlambat membayar pajak sehingga selalu terkena sanksi administrasi
3. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi	3. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar
	4. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan ketelambatan pembayaran

e. Sistem Samsat Drive Thru (X4)

Drive Thru adalah sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Dalam hal ini pengemudi tidak perlu turun dari kendaraannya. Pengemudi cukup memberikan data STNK lamanya di loket yang bisa dicapai tanpa perlu keluar dari mobil. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, masyarakat

pengguna tinggal mengambil bukti telah membayar pajak kendaraan dan tanda bukti perpanjangan STNK (Prianggono dan Adrian, 2010). Sistem samsat drive thru memenuhi sistem lebih terkontrol, sistem yang mudah, menghemat waktu, wajib pajak semakin meningkat, kualitas pelayanan, dan letak wilayah.

Indikator	Sistem Samsat Drive Thru
1. Samsat Drive Thru dapat lebih terkontrol dalam hal pendataan kendaraan bermotor	1. Program sistem drive thru dapat lebih terkontrol dalam pendataan kendaraan bermotor
2. Wajib Pajak dapat dengan mudah membayar pajak dengan menggunakan samsat Drive Thru	2. Tatacara pembayaran pajak menggunakan sistem drive thru sulit untuk dilakukan
3. Minat wajib pajak makin meningkat	3. Saya semakin berminat untuk terus menggunakan sistem drive thru dalam pembayaran pajak
4. Menghemat waktu	4. Pembayaran pajak dengan sistem drive thru dapat menghemat waktu
5. Kualitas Pelayanan	5. Petugas sistem drive thru bersikap ramah, sopan dan terampil dalam melayani setiap Wajib Pajak
6. Letak wilayah	6. Letak wilayah drive thru sangat Strategis

Metoda Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Untuk memberi gambaran mengenai variabel yang diteliti digunakan statistik deskriptif. Untuk menguji kualitas data digunakan uji validitas dan reliabilitas. Agar persamaan regresi dapat bersifat BLUE maka dilakukan uji asumsi yang meliputi normalitas data, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Reliabilitas Data

Berdasarkan hasil uji validitas dibuktikan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid. Hal ini karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Berdasarkan uji reliabilitas dapat diketahui bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan reliabel. Hal ini karena setiap butir pertanyaan

pada setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha di atas 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat dinyatakan

data dalam penelitian ini sudah lolos dalam pengujian asumsi klasik yang diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas

Analisi Regresi Berganda

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 3
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	54.708	4	13.677	4.554	.002^a
Residual	285.292	95	3.003		
Total	340.000	99			

a. Predictors: (Constant), Sistem Samsat Drive Thru, Sanksi PKB, Pengetahuan WP, Kesadaran WP

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP PKB

Sumber: Data primer diolah, 2016

Uji Parsial (Uji Statistik T)

Tabel 4
Uji Statistik

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	8.716	2.401		3.630	.000
	Pengetahuan WP	.009	.085	.010	.100	.921
	Kesadaran WP	.267	.074	.352	3.592	.001
	Sanksi PKB	.001	.076	.002	.016	.987
	Sistem Samsat Drive Thru	.149	.060	.243	2.469	.015

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP PKB

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan persamaan regresi-nya adalah:

$$Y = 8,716 + 0,009X_1 + 0,267X_2 + 0,001X_3 + 0,149X_4 + \epsilon$$

1. Hipotesis 1: Pengetahuan Wajib Pajak (X₁) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 2 menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 (0,921 > 0,05) dan t hitung < t

tabel (0,100 < 1,6611). Hal ini menyatakan bahwa H₀ diterima dan H₁ ditolak. Variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mendukung penelitian Ummah (2015).

2. Hipotesis 2: Kesadaran Wajib Pajak (X₂) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 2 menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,001 > 0,05) dan t hitung > t tabel (3,592 > 1,6611). Hal ini menyatakan bahwa H₀ ditolak dan H₂ diterima. Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mendukung penelitian Ilhamsyah dkk., (2016).

3. Hipotesis 3: Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (X₃) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 3 menyatakan bahwa tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 (0,987 > 0,05) dan t hitung < t tabel (0,016 < 1,6611). Hal ini menyatakan

bahwa H₀ diterima dan H₃ ditolak. Variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mendukung penelitian Irianingsih (2015).

4. Hipotesis 4: Sistem Samsat Drive Thru (X₄) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Berdasarkan tabel 4 pada hipotesis 4 menyatakan bahwa variabel tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,015 > 0,05) dan t hitung > t tabel (2,469 > 1,6611). Hal ini menyatakan bahwa H₀ ditolak dan H₄ diterima. Variabel sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Mendukung penelitian Rahmawati (2013).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.401 ^a	.161	.126	1.733

a. Predictors: (Constant), Sistem Samsat Drive Thru, Sanksi PKB, Pengetahuan WP, Kesadaran WP

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP PKB

Sumber: Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tabel 5 diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,126 artinya besarnya pengaruh dari pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sisanya sebesar 87,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor dipengaruhi lain yang tidak diamati dalam penelitian.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Sistem samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

REFERENSI

- Affandi, Ahmad,. 2008. "Efektifitas Pelayanan Publik oleh Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto melalui Samsat Link" (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)
- Carolina, Veronica. 2009. Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, Imam. 2011. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ihsan, Muchsin. 2013. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara.2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1
- Irianingsih, Eka. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman
- Isyatir, Anis Isnaini Nur. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Jati, Amanda R. Siswanto Putri dan I Ketut. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana (UNUD), Bali, Indonesia.
- Mawardi, Leganek. 2001. "Optimalisasi Samsat Drive Thru Guna Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Mendukung Transparansi Pelayanan Polri Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan". Skripsi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Nurlaela, Siti. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal Paradigma Vol. 11 No. 02.
- Priyatno, Dwi. 2014. SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Rahmawati, Novia. 2013. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Melalui Layanan Samsat Drive Thru (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Batu Kota). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Sari, R.A.Vivi Yulian dan Neri Susanti. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. Jurnal Review. Universitas Dehasen Bengkulu.
- Siahaan, Marihot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta : Raja Grafindo
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 4 No.2 (2013): 345-357

Ummah, Muslikhatul. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro.



PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN DEFERRED TAX EXPENSE TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Rendi *
 Sri Suranta

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Sebelas Maret
 *email: rendi@student.uns.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out the effect of corporate governance and deferred tax expense toward earnings management in Indonesia. Corporate governance represented by board of commissioner, independent commissioner, institutional ownership, and female commissioner.

Sample in this study consists of 100 manufacturing companies in 2013 and 2014. Sample is taken using the purposive sampling method. Regression results show that institutional ownership, and deferred tax expense are influencing the earnings management, while the board of commissioner, independent commissioner and female commissioner are not.

INFO ARTIKEL

Diterima: 31 Maret 2017
 Direview: 18 April 2017
 Disetujui: 6 Juni 2017
 Terbit: 13 Juni 2017

Keywords:

corporate governance,
 deferred tax expense,
 earnings management

PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ekonomi perusahaan pada periode tertentu. Sulistyanto (2008) berpendapat bahwa laporan keuangan dinilai sebagai informasi yang berkualitas apabila menyajikan informasi yang relevan, netral, lengkap (komprehensif) serta mempunyai daya banding dan daya uji.

Informasi tentang laba (earnings) mempunyai peran yang sangat penting bagi pihak yang berkepentingan (investor, kreditor, dan regulator) terhadap suatu perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa mendatang.

Fleksibilitas penyusunan laporan keuangan diatur dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang penyajian laporan keuangan dengan pendekatan akrual (accrual basis). Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (Halim, Meiden, dan Tobing, 2005).

Penggunaan basis akrual mengakibatkan adanya keleluasaan manajemen suatu perusahaan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan asalkan tidak menyimpang dari

regulasi yang ada. Hal ini dimanfaatkan manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik. Tindakan manajemen yang mengambil keuntungan pribadi tersebut menyebabkan timbulnya *agency cost*.

Beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi antara lain Enron, Xerox, dan Worldcom. Kasus Enron pada tahun 2001 merupakan kasus manipulasi laba. Enron menggunakan beberapa partner strategis untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari para investor. Akan tetapi, kecurangan ini dapat terdeteksi dengan sendirinya. Pada akhirnya, Enron kehilangan kepercayaan dari para investor dan dinyatakan pailit (Sulistiawan et al., 2011).

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT Kimia Farma. PT Kimia Farma Tbk tahun 2001 diduga melakukan mark up laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001. Dalam laporan tersebut Kimia Farma menghasilkan laba sebesar Rp132 miliar. Setelah diperiksa kembali Kimia Farma hanya memperoleh laba sebesar Rp99 miliar. Hal tersebut dilakukan karena dewan direksi ingin menaikkan laba perusahaan agar harga saham perusahaan meningkat (Sulistiawan et al., 2011).

Manajemen laba timbul karena adanya konflik kepentingan antara principals (pemegang saham) dan agents (manajer) (Suryawathy dan Putra, 2015). Praktik ini melibatkan perubahan pada angka-angka keuangan yang kadangkala dapat menyesatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan. Untuk mengurangi praktik manajemen laba, implementasi mekanisme corporate governance dipercaya sebagai alat terkemuka untuk mengawasi operasi sebuah perusahaan (Man dan Wong, 2013).

Dalam konteks bisnis, perempuan lebih beretika dan kemungkinan kecil melakukan tindakan tidak etis untuk mendapatkan insentif keuangan (Khazanchi, 1995). Selain itu, perempuan lebih baik dalam mengungkapkan informasi sukarela yang dapat mengurangi asimetri informasi antara direksi dan manajer serta lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan (Gul et al., 2009). Oleh

karena itu, keberadaan perempuan dalam corporate governance perusahaan sangat penting demi tercapainya keefektifan pengendalian perusahaan.

Selain itu, manajemen laba dapat terjadi dengan menaikkan laba atau menurunkan laba. Manajemen dengan menaikkan laba biasanya digunakan untuk mendapatkan citra perusahaan terhadap investor. Sedangkan manajemen laba dengan menurunkan laba digunakan untuk mengurangi beban pajak.

Setelah diberlakukannya PSAK 46, perusahaan harus mengakui beban pajak penghasilan pada waktu berjalan beserta pajak tangguhan (Surrangan, 2007). Pajak tangguhan (deferred tax) adalah efek pajak yang diakui pada saat diadakan penyesuaian dengan beban pajak penghasilan periode yang akan datang. Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat disebabkan karena penerapan metode akuntansi yang berbeda, sebagai contoh dalam metode pencadangan kerugian piutang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa banyak BUMN yang melakukan rekayasa akuntansi. Hal tersebut dilakukan agar laba terlihat lebih besar (overstated) demi mendapatkan reward (bisnis.liputan6.com). Kasus lainnya terjadi di Jepang, yaitu Toshiba Corp yang melakukan kecurangan sistematis untuk menggelembungkan keuntungannya (autotekno.sindonews.com).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh corporate governance dan deferred tax expense terhadap earnings management pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai sebuah kontrak antara satu atau lebih individu (principals) dengan individu lain (agents) untuk melakukan suatu jasa sesuai kepentingan mereka (principals) yang melibatkan pelimpahan beberapa pengambilan keputusan kepada agents. Hubungan agensi ini seharusnya dapat menjadi hubungan yang menguntungkan bagi kedua

pihak. Tetapi, kedua belah pihak yang berhubungan memiliki kepentingan masing-masing sehingga terdapat alasan bahwa agen yang dalam hal ini manajer tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Eisenhardt (1989) berkata bahwa teori agensi memiliki dua masalah yang dapat terjadi. Pertama, masalah agensi dapat timbul karena adanya konflik antara keinginan atau tujuan dari principals dan agents dan sulit bagi principals untuk mengetahui apakah yang sebenarnya telah dilakukan oleh agents. Masalah kedua adalah risk sharing yang timbul ketika principals dan agents memiliki perbedaan tindakan dalam menghadapi risiko. Masalah dalam hal ini timbul karena agents dan principals memiliki perbedaan tindakan karena perbedaan preferensi risiko. Kedua masalah tersebut pada dasarnya terjadi karena adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Manajer seringkali bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemilik. Masalah agensi juga merupakan salah satu dari penyebab adanya manajemen laba. Manajemen laba timbul karena adanya konflik kepentingan antara principals (pemilik) dan agents (manajer) (Suryawathy dan Putra, 2015). Untuk mengurangi manajemen laba, penggunaan corporate governance dipercaya sebagai suatu alat yang efektif untuk memantau jalannya sebuah perusahaan (Man dan Wong, 2013). Masalah agensi tersebut dapat diminimalkan dengan adanya corporate governance.

Diversifikasi dewan didukung oleh agency theory (Jensen and Meckling, 1976). Diversifikasi jenis kelamin mengurangi konflik antara manajer dan pemegang saham. Diversifikasi dapat menghasilkan ide-ide baru, kreatifitas, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif (Huse dan Solberg, 2006). Selain itu, diversifikasi mencegah individu atau sekelompok orang untuk mendominasi proses pengambilan keputusan dan mengurangi masalah agensi (Aguir et al., 2015).

Manajer dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan. Manajer dapat merekayasa besarnya beban pajak tangguhan (deferred tax expense) untuk menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. Manajemen cenderung mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka

berdasarkan program kompensasi perusahaan karena manajer memiliki informasi yang lebih baik atas laba bersih perusahaan (Healy, 1985).

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Selain itu, menurut Sulistyanto (2008), corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder-nya.

Menurut FCGI (2003), corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Selain itu, menurut Sulistyanto (2008), corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder-nya.

Corporate governance adalah alat yang digunakan dalam mengatur hubungan manajemen dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan perusahaan yang berjalan sesuai dengan arahnya dan mendapatkan nilai tambah, serta agar mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan empat variabel sebagai proksi dari corporate governance.

Ukuran Dewan Komisaris

Secara umum, dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Hal tersebut harus dilakukan mengingat adanya kepentingan tertentu dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan investor. Dewan Komisaris memegang peranan

yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good corporate governance.

Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris independen memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mampu mengurangi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan manajer (Nabila dan Daljono, 2014). PBI No. 8/4/PBI/2006 menyatakan bahwa komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur Kepemilikan Institusional

Griffin dan Ebert (2007) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh investor besar seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. Mereka umumnya dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti perusahaan dan industri, sedangkan pemegang saham individu cenderung memiliki waktu yang terbatas untuk memantau kinerja perusahaan. Mereka menginvestasikan uang dalam jumlah besar ke dalam suatu perusahaan sehingga memiliki kepentingan yang lebih besar untuk memantau perusahaan.

Proporsi Komisaris Perempuan

Dalam konteks bisnis, perempuan lebih beretika dan kemungkinan kecil melakukan tindakan tidak etis untuk mendapatkan insentif keuangan (Khazanchi, 1995). Selain itu, perempuan lebih baik dalam mengungkapkan informasi sukarela yang dapat mengurangi asimetri informasi antara direksi dan manajer serta lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan (Gul et al., 2009). Oleh karena itu, dengan adanya perempuan dalam komisaris membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan kinerja perusahaan akan meningkat dengan sendirinya.

Deferred Tax Expense

Menurut Yulianti (2005) beban pajak tangguhan (deferred tax expense) adalah beban

yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Beban pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut SAK untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak). Hal ini memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan.

Earnings Management

Manajer dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan. Manajer dapat merekayasa besarnya beban pajak tangguhan (deferred tax expense) untuk menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. Manajemen cenderung mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka berdasarkan program kompensasi perusahaan karena manajer memiliki informasi yang lebih baik atas laba bersih perusahaan (Healy, 1985).

Menurut Sulistyanto (2008) manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Ada dua pandangan tentang tindakan manajemen laba. Pandangan pertama berasal dari para praktisi (investor, pemerintah, asosiasi profesi, dan pelaku ekonomi lainnya). Para praktisi menganggap manajemen laba sebagai kecurangan. Para praktisi beralasan bahwa manajemen laba memengaruhi besar kecilnya laba yang diinformasikan perusahaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, manajemen laba dianggap menyesatkan dan merugikan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai sumber informasi untuk mengetahui segala sesuatu tentang perusahaan. Pandangan kedua berasal dari para akademisi. Para akademisi menilai manajemen laba bukan sebagai kecurangan. Hal ini disebabkan karena aktivitas manajerial ini pada

dasarnya merupakan dampak dari aturan prinsip akuntansi berterima umum yang luas.

Dari dua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen laba sebenarnya boleh dilakukan asalkan masih dalam lingkup akuntansi berterima umum. Jika manajemen laba sudah dilakukan secara berlebihan oleh manajer dan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka manajemen laba sudah menjadi hal yang tidak patut untuk dilakukan karena dapat merusak tatanan ekonomi perusahaan.

Menurut Sulistyawan et al. (2011) terdapat beberapa hal yang memotivasi individu atau badan usaha dalam melakukan praktik manajemen laba di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Motivasi Bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah yang relatif tetap dan rutin. Akan tetapi, untuk bonus yang nilainya besar hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada pada area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Salah satu ukuran dari kinerja manajemen adalah melalui pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya demi mendapatkan bonus yang maksimal.

2. Motivasi Utang

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga seperti kreditor untuk melakukan ekspansi bisnis. Agar kreditor mau menginvestasikan dananya di perusahaan, maka manajer harus menunjukkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, untuk memperoleh pinjaman dalam jumlah yang besar, maka praktik manajemen laba seringkali muncul untuk menampilkan kinerja perusahaan yang baik.

3. Motivasi Pajak

Praktik manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan go public dan untuk kepentingan harga saham semata, akan tetapi untuk kepentingan perpajakan juga. Biasanya

kepentingan tersebut didominasi oleh perusahaan yang belum go public. Perusahaan yang belum go public cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Kecenderungan tersebut memotivasi manajer untuk bertindak kreatif dengan melakukan praktik manajemen laba agar laba fiskal yang dilaporkan terlihat lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Earnings Management

Perusahaan yang memiliki banyak anggota dewan komisaris akan kesulitan dalam melakukan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan sehingga berdampak pada kinerja perusahaan yang menurun. Oleh karena itu semakin banyak anggota dewan komisaris maka semakin besar kemungkinan manajemen laba yang terjadi. Hal ini sesuai dengan penelitian Yermack (1996) yang menyimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris yang kecil akan lebih efektif dalam melakukan fungsi pengawasan.

H1: Corporate governance yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap earnings management.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Earnings Management

Dewan komisaris adalah pihak yang bertugas dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi (UU No. 40 tahun 2007). Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajer, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

Komisaris independen dapat bertindak mengawasi kebijakan manajemen dan memberikan pengarahan kepada manajemen. Komisaris independen diharapkan lebih efektif

dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen perusahaan (Sari dan Asyik, 2014)

H2: Corporate governance yang diprosikan dengan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap earnings management.

Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Earnings Management

Pemegang saham institusional cenderung memiliki lebih banyak informasi dari pemegang saham individu (Man dan Wong, 2013). Mereka berinvestasi uang dalam jumlah besar ke dalam suatu perusahaan sehingga memiliki kepentingan yang lebih besar untuk memantau perusahaan. Ketika perusahaan berkinerja buruk, mereka dapat menekan manajer perusahaan dan bahkan menarik investasi mereka. Cornel et al. (2006) menemukan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor institusional akan mengurangi celah perilaku para manajer dalam melakukan manajemen laba.

H3: Corporate governance yang diprosikan dengan struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap earnings management.

Pengaruh Proporsi Komisaris Perempuan terhadap Earnings Management

Perempuan secara aktif menghadiri rapat direksi, hal tersebut menguatkan pengawasan direksi (Adam dan Ferreira, 2009). Selain itu, keberadaan perempuan komisaris memberikan pengaruh positif pada kualitas laba sehingga bermanfaat dalam menghindari praktik manajemen laba (Aguir et al., 2015).

H4: Corporate governance yang diprosikan dengan proporsi komisaris perempuan berpengaruh negatif terhadap earnings management.

Pengaruh Deferred Tax Expense terhadap Earnings Management

Deferred tax expense adalah komponen beban pajak penghasilan yang menunjukkan efek pajak yang timbul dari perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, hal utama yang menyebabkan perbedaan temporer tersebut

muncul adalah pengakuan pendapatan dan beban secara accrual yang berbeda antara laba akuntansi dan laba fiskal dalam periode yang berbeda (Philips et al., 2003). Philips et al. (2003) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi dua tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian. Perhitungan laba fiskal yang didasarkan pada undang-undang perpajakan memberikan batasan yang lebih ketat dalam pengukuran akrual dibandingkan standar akuntansi sehingga semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal menunjukkan semakin besarnya diskresi manajemen. Besarnya diskresi manajemen tadi dapat ditunjukkan dalam variabel deferred tax expense. Dengan demikian semakin besar nilai deferred tax expense menunjukkan semakin tinggi kemungkinan manajemen perusahaan dalam melakukan manajemen laba (Yulianti, 2005).

H5: Deferred tax expense berpengaruh positif terhadap earnings management.

METODOLOGI PENELITIAN

Data dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari annual report (laporan tahunan) yang diakses di website BEI. Perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama periode 2013-2014. Jumlah populasi awal perusahaan manufaktur pada tahun 2013 dan 2014 adalah 276 item. Namun, jumlah perusahaan yang menjadi sampel oleh peneliti berkurang karena tidak sesuai dengan kriteria pemilihan sampel yang dilakukan oleh peneliti.

Metode penetapan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang terbatas pada jenis tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2013).

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1) Variabel Dependen

Manajemen laba diprosikan oleh akrual kelolaan (discretionary accrual). Model pengukuran manajemen laba yang digunakan adalah modified jones model. Menurut Dechow et al. (1995), Modified Jones Model dapat

mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya. Penelitian ini menggunakan discretionary accruals yang dikembangkan oleh Dechow (1995).

1. Menentukan nilai total akrual dengan formulasi sebagai berikut:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

2. Menentukan nilai parameter β_1 , β_2 , dan β_3 dengan formulasi sebagai berikut:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1}) + e$$

3. Setelah diketahui nilai parameter β_1 , β_2 , dan β_3 atau beta, selanjutnya masukkan nilai yang ada dalam formula dibawah ini sehingga nilai NDA bisa didapatkan.

$$NDA_{it} = \beta_1(1/A_{it-1}) + \beta_2(\Delta Rev_{it}/A_{it-1} - \Delta Rec_{it}/A_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/A_{it-1})$$

3. Menentukan nilai discretionary accruals (DA) yang merupakan indikator manajemen laba akrual dengan cara sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it} = Discretionary Accruals pada periode ke t;

NDA_{it} = Non Discretionary Accruals pada periode ke t;

TA_{it} = Total akrual pada periode ke t;

NI_{it} = Laba bersih (Net Income) pada periode ke -t;

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi pada periode ke t;

A_{it-1} = Total aset pada periode ke t -1;

ΔRev_{it} = Perubahan pendapatan dari periode t-1 ke periode t;

PPE_{it} = Aset tetap (property, plant, equipment) pada periode ke t;

ΔRec_{it} = Perubahan piutang dari periode t-1 ke periode ke t;

β = Parameter yang diperoleh dari persamaan regresi; dan

e = error terms.

2) Variabel Independen

- a) Ukuran Dewan Komisaris

Secara umum, dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris adalah jumlah

total anggota dewan komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Total seluruh anggota dewan komisaris adalah indikator ukuran dewan komisaris (Ujjiyantho dan Pramuka, 2007).

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \text{Total Dewan Komisaris}$$

- b) Proporsi Komisaris Independen

PBI No. 8/4/PBI/2006 menyatakan bahwa komisaris independen adalah dewan komisaris

yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

c) Struktur Kepemilikan Institusional

Griffin dan Ebert (2007) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh investor besar seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. Mereka umumnya dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti perusahaan dan industri, sedangkan pemegang saham individu cenderung

memiliki waktu yang terbatas untuk memantau kinerja perusahaan.

Bainer et al. (2003) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan Institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan (Sari dan Asyik, 2013).

$$\text{Proporsi Komisaris Perempuan} = \frac{\text{Total Komisaris Perempuan}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

d) Deferred Tax Expense

Deferred tax expense dihasilkan dari selisih antara aktiva pajak tangguhan dan utang pajak tangguhan (Djamaluddin et al., 2008).

Berdasarkan penelitian mereka variabel deferred tax expense diukur dengan cara memboobot deferred tax expense dengan total aktiva pada akhir tahun t-1.

$$DTE_{it} = \frac{\text{Deferred Tax Expense}}{\text{Total Aktiva } t-1} \times 100\%$$

Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan tiga pengujian yaitu, analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan uji regresi linear berganda. Menurut Ghazali (2013) analisis deskriptif adalah salah satu uji yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari nilai rata-rata. (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan.

1) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dipakai untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Menurut Ghazali (2013), uji statistik

deskriptif memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel. Alat yang digunakan adalah rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui distribusi data.

2) Uji Regresi Linier Berganda

Regresi berganda merupakan suatu model analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh dan hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. model persamaan regresi yang dipakai untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$EM = \alpha + \beta_1 COM + \beta_2 INCOM + \beta_3 IO + +\beta_4 INFEM$$

Dimana:
 EM : Earnings Management;
 : Konstanta;
 COM : Ukuran Dewan Komisaris;
 INCOM : Proporsi Komisaris Independen;
 IO : Struktur Kepemilikan Institusi;
 INFEM : Proporsi Komisaris Perempuan;
 DTE : Deferred Tax Expense; dan
 : koefisien error.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seleksi Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data tersebut berasal dari annual report yang terdapat pada situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id. Perusahaan yang menjadi obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI selama periode 2013-2014.

Tabel 1
Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

Kriteria Pengambilan Sampel	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2014	276
Perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode 2013-2014 yang datanya tidak memenuhi kriteria	121
Perusahaan yang menjadi outlier	55
Perusahaan yang menjadi sampel	100

Sumber: Data Diolah

Populasi penelitian ini berjumlah 276 perusahaan yang terdiri dari 138 perusahaan manufaktur tahun 2013 dan 138 perusahaan manufaktur tahun 2014 yang terdaftar di BEI. Berdasarkan metode pengambilan purposive

sampling, terdapat 100 perusahaan yang menyediakan data yang lengkap terkait dengan penelitian ini.

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
EM	100	-0,016080	0,231860	0,105367	0,055528
COM	100	2	11	4,16	1,813
INCOM	100	0,17000	0,80000	0,391000	0,100750
IO	100	0,08000	0,99000	0,682700	0,200358
INFEM	100	0,00000	0,67000	0,138100	0,178658

Sumber: Data Diolah

Earnings Management (EM) memiliki nilai minimum sebesar -0,016080 pada PT Bentoel International Investama pada tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar 0,231860 pada PT Nipress Indonesia pada tahun 2014. Nilai rata-rata EM sebesar 0,105367 dan standar deviasi sebesar 0,055528.

Ukuran Dewan Komisaris (COM) memiliki nilai minimum sebesar 2 di antaranya

pada PT Eratex Djaja, PT Lotte Chemical Titan, PT Intikeramik Alamasri Industri, PT Langgeng Makmur Industri pada tahun 2013, serta PT Ekadharna International, PT Eratex Djaja, Lotte Chemical Titan, PT Intikeramik Alamsari Industri, PT Jaya Pari Steel pada tahun 2014. Nilai maksimum sebesar 13 pada PT Astra International pada tahun 2014. Nilai rata-rata COM sebesar 4,16 dan standar deviasi sebesar 1,813.

Proporsi Komisaris Independen (INCOM) memiliki nilai minimum sebesar 0,17000 pada PT Unggul Indah Cahaya pada tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar 0,80000 pada PT Unilever Indonesia pada tahun 2014. Nilai rata-rata INCOM sebesar 0,391000 dan standar deviasi sebesar 0,100750.

Kepemilikan Institusional (IO) memiliki nilai minimum sebesar 0,08000 pada PT Martina Berto pada tahun 2013 dan nilai maksimum sebesar 0,99000 pada PT Tifico Fiber Indonesia pada tahun 2013 dan 2014. Nilai rata-rata sebesar 0,682700 dan standar deviasi sebesar 0,200358.

Proporsi Komisaris Perempuan (INFEM) memiliki nilai minimum sebesar 0,00000 di antaranya pada PT Polychem Indonesia, PT Alam Karya Unggul, PT Alkrindo Naratama, dan PT Arwana Citra mulia pada tahun 2013, serta PT Polychemm Indonesia, PT Tiga Pilar Sejahtera, PT Asahimas Flat Glass, dan PT Asiaplast Industries pada tahun 2014.

Nilaimaksimum sebesar 0,67000 pada PT Martino Berto pada tahun 2013. Nilai rata-rata sebesar 0,138100 dan standar deviasi sebesar 0,178658.

Deferred Tax Expense (DTE) memiliki nilai minimum sebesar 0,000024 pada PT Champion Pasific Indonesia pada tahun 2013 dan nilai maksimum sebesar 0,188261 pada PT Alam Karya Unggul pada tahun 2013. Nilai rata-rata sebesar 0,022492 dan standar deviasi sebesar 0,029021.

Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian Hipotesis bertujuan untuk pengaruh antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. Hasil analisis regresi yang menunjukkan signifikansi model regresi dalam memberikan dasar untuk menerima atau menolak hipotesis penelitian untuk setiap variabel independen dan juga signifikansi koefisien antar variabel.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,479 ^a	0,230	0,189	0,050019362

a. Predictors: (Constant), COM, INCOM, IO, INFEM, DTE

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square (R²) sebesar 0,230 dan Adjusted R Square (Adjusted R²) sebesar 0,189. Hal tersebut \ bahwa kemampuan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris

independen, struktur kepemilikan institusional, proporsi komisaris perempuan, dan deferred tax expense mampu menjelaskan varians variabel dependennya sebesar 18,9%, sedangkan 81,1% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model analisis.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda (Lanjutan)
Coefficients^a

	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	,184	,031		5,985	,000
COM	-,011	,003	-,367	-3,869	,000
INCOM	,038	,053	,069	,725	,470
IO	-,078	,027	-,281	-2,915	,004
INFEM	-,027	,031	-,088	-,887	,377
DTE	,476	,178	,249	2,675	,009

a. Dependent Variable: EM

Hipotesis 1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap earnings management

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap earnings management. Berdasarkan hasil olah

data, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,011 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap earnings management sehingga **hipotesis pertama ditolak**.

Hipotesis 2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap earnings management

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh proporsi komisaris independen terhadap earnings management. Berdasarkan hasil olah data, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,038 dan nilai signifikansi sebesar 0,470. Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap earnings management sehingga **hipotesis kedua ditolak**.

Hipotesis 3: Struktur Kepemilikan Instutusional berpengaruh negatif terhadap earnings management

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap earnings management. Berdasarkan hasil olah data, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,078 dan nilai signifikansi sebesar 0,004. Jadi, dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap earnings management sehingga **hipotesis ketiga diterima**.

Hipotesis 4: Proporsi Komisaris Perempuan berpengaruh negatif terhadap earnings management

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh proporsi komisaris perempuan terhadap earnings management berdasarkan hasil oleh data, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,027 dan nilai signifikansi sebesar 0,377. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris perempuan tidak berpengaruh terhadap earnings management sehingga **hipotesis keempat ditolak**.

Hipotesis 5: Deferred Tax Expense berpengaruh positif terhadap earnings management

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji pengaruh deferred tax expense terhadap earnings management. Berdasarkan hasil olah data, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,476

dan nilai signifikansi sebesar 0,009. Jadi, dapat disimpulkan bahwa deferred tax expense berpengaruh positif terhadap earnings management sehingga **hipotesis kelima diterima**.

KESIMPULAN

Berdasar hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Struktur kepemilikan institusional dan deferred tax expense berpengaruh terhadap earnings management, sedangkan ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan proporsi komisaris perempuan tidak berpengaruh terhadap earnings management.

Beberapa keterbatasan atas penelitian ini, antara lain: (1) penelitian ini tidak memasukkan seluruh variabel corporate governance seperti kepemilikan manajerial, komite audit, dan ukuran dewan direksi, untuk itu penelitian mendatang perlu memasukkan variabel-variabel tersebut, dan (2) model earnings management melalui kebijakan akuntansi yaitu modified jones model. Saran penelitian mendatang sebaiknya earnings management melalui kebijakan akuntansi dan aktivitas riil, kemudian membandingkan kedua model tersebut.

REFERENSI

- Aguir, A., N. Lakhali, dan A. Malek. 2015. Do Women On Board And In Top Management Reduce Earning Management? Evidence in France. *The Journal of Applied Business Research*, Vol. 31, No. 3: 1107-1118.
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Dechow, Patricia M., Richard G. Sloan and Amy P Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, Vol. 70, No. 2, Pp. 193-225.
- Dechow, P. M., R. G. Sloan, dan A. P. Sweeney. 1996. Causes and Consequences of Earnings Manipulation: an Analysis

- of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*, Vol. 13: 1-36.
- Djamaluddin, S., H. T. Wijayanti, dan Rahmawati. 2008. Analisis Perbedaan Antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba, Akrua, dan Aliran Kas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 11, No. 1: 52-74.
- Eisenhardt, K. M. 1989. Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1: 57-74.
- Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi Edisi 7. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Griffin, R. W., dan R. J. Ebert. 2007. *Business*, Pearson International Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Gul, F. A., S. Y. K. Fung, dan B. Jaggi. 2009. Earnings quality: Some Evidence on the Role of Auditor Tenure and Auditors' Industry Expertise. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 47, No. 3: 265-287.
- Halim, J., C. Meiden, dan R. L. Tobing. 2005. Pengaruh Manajemen Laba pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45. Simposium Nasional Akuntansi VIII. 15-16 September 2005, Solo.
- Healy, P. 1985. The effect of bonus schemes on accounting decisions. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 7: 85-107.
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4: 305-360.
- Khazanchi, D. 1995. Unethical Behavior in Information Systems: The Gender Factor. *Journal of Business Ethics*, Vol. 14, No. 9: 741-749.
- Nasution, M., dan D. Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli 2007, Makassar.
- Sari, S. R., dan N. F. Asyik. 2013. Pengaruh Leverage dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 6: 21-36.
- Sekaran, U., dan R. Bougie. 2013. *Research Methods for Business*. United Kingdom: John Wiley and Sons Inc.
- Sulistiawan, D., Y. Januarsi, dan L. Alvia. 2011. Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Laba dan Skandal Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistyanto, H. S. 2008. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: Grasindo.
- Suryawathy, I G. A., dan I G. C. Putra. 2015. Corporate Governance Mechanisms, Earnings Management and Company Performance. Asia Pacific Conference on Accounting and Finance.
- Ujiyantho, M. A., dan B. A. Pramuka. 2007. Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 September 2007, Makassar.
- www.autotekno.sindonews.com Diakses pada 17 Juli 2016.
- www.bisnis.liputan6.com Diakses pada 17 Juli 2016.
- www.idx.co.id Diakses pada 1 Mei 2016.



PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Andrea Meylita Widyasti Parera*
Teguh Erawati

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
 *email: lita_parera@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of awareness of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, and service tax authorities on tax compliance and building earth. The sampling technique in this study using a convenience sampling (convenience sampling) to 110 taxpayer earth and office buildings in the Department of Revenue, Finance and Asset Management Area (DPPKAD) Yogyakarta that meet the criteria.

The data used are primary data through questionnaires, which contain a respondent's answers. Analysis of the data in this study using descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The first hypothesis: awareness taxpayer positive effect on tax compliance on land and buildings, both: tax penalty positive effect on tax compliance on land and buildings, three: knowledge of taxation positive effect on tax compliance on land and buildings, a fourth: the service tax authorities positive effect on tax compliance and building earth. The fourth hypothesis can be proved by the results of the study showed that awareness of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, and service fiskus positive effect on tax compliance and building earth.

INFO ARTIKEL

Diterima: 18 April 2017
 Direview: 18 April 2017
 Disetujui: 12 Juni 2017
 Terbit: 13 Juni 2017

Keywords:

Awareness of taxpayers, tax penalties, tax knowledge, Service tax authorities, taxpayers Compliance

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak (Lusia dkk, 2013). Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran

yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011) dalam (Imam dan Dewi,2015). Pemerintah Kota setiap tahunnya

mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut terealisasi dengan sempurna.

Tabel 1.1

Tabel Realisasi Surat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun	Ketetapan		Realisasi		Persentase	
	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah	Wajib Pajak	Rupiah
2014	95.359	42.700.000.000	63.674	43.753.961.720	64,11	75,69
2015	91.635	50.000.000.000	60.441	46.171.820.767	64,38	76,06
2016	90.685	53.000.000.000	61.531	49.757.915.885	60,24	60,05

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Yogyakarta, Januari 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa presentase wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak menurun tiap tahun, dimana tahun 2014 terdapat 64,11% wajib pajak yang membayar kewajiban PBBnya, tahun 2015 64,38% dan tahun 2016 60,24% selain itu, presentase realisasi pendapatan daerah dari PBB terhadap ketetapannya menurun drastis di tahun 2014, dimana realisasi PBB tahun 2014 75,69%, tahun 2015 76,06%, dan tahun 2016 60,05%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun perhitungan PBB dilakukan secara official asesment system, namun diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya.

Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak.

Kata sanksi dalam kamus bahasa Indonesia berarti tanggungan(tindakan,hukuman,dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan(Mardiasmo,2003:39 dalam Sri Mutia,2014).

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang disiplin dan taat, serta tidak memiliki tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak.Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

- Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
- Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
- Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?
- Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan?

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Teori Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut (Soemitro, 2006:1) dalam (Nafilah, 2013) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak bergerak

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian kepatuhan pajak menurut (Zain, 2003:31) adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Leni Samira, 2015).

Kesadaran wajib pajak

Menurut (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013) kesadaran berpengaruh positif terhadap

kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Agus Nugroho Jatmiko, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Agus Nugroho Jatmiko, 2006).

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Penelitian Terdahulu

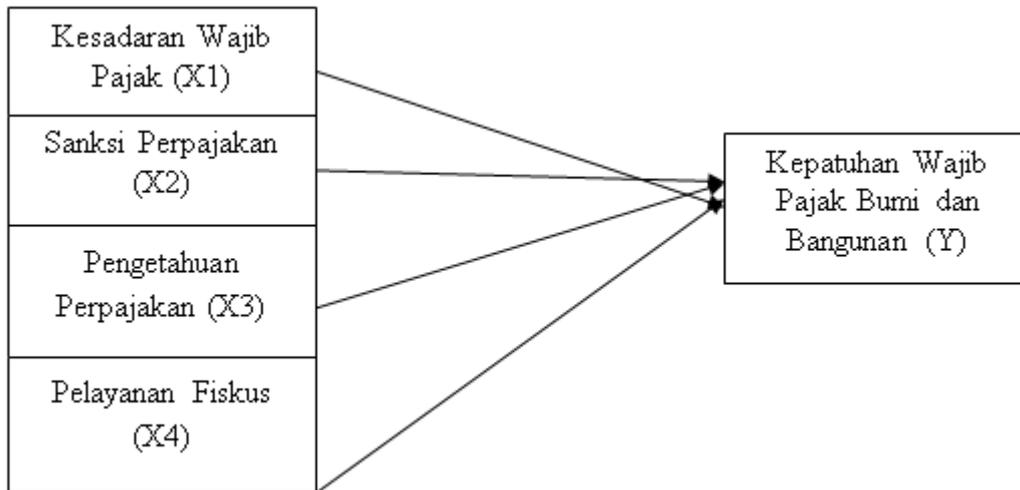
Penelitian oleh Kadek Suciningsih dkk(2015) tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan dari sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kualitas

pelayanan, kesadaran wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

Dengan adanya kerangka pikir tersebut dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan, artinya apabila tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus naik maka kepatuhan wajib pajak juga akan naik. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus turun maka kepatuhan wajib pajak akan turun.

Pengembangan Hipotesis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Yusdinar dkk(2015) dalam (Purwanti,2016) wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban namun mereka menganggap hal ini adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan suka rela.

Penelitian oleh Nila Puspita,2016 menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran

wajib pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, pada kecamatan padang utara menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Eken Patmasari,dkk 2016 tentang Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan negatif, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan negatif, sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H1 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya (Hutagaol, 2007:8) dalam (Sri Mutia,2014)

Penelitian oleh Aprilia dan P D'yan,2012 tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Denpasar Timur.

Hasil Penelitian Laura Yohana,2016 tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat(Banyu Utomo,2011).

Penelitian oleh Banyu Utomo,2011 tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan menunjukkan secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Rahayu (2010) dalam Rizky Widowati(2015) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.

Penelitian oleh Imam dan Dewi,2015 tentang pengaruh pemahaman wajib pajak,kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menunjukkan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta.

H4 : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta.Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat wajib pajak di

Kota Yogyakarta. Pengumpulan data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada pamong yang diambil sebagai sampel sebanyak 110 orang. Penyebaran kuisioner dilakukan pada tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan 5 Januari 2016. Dengan melibatkan 110 responden yang merupakan masyarakat wajib pajak di Kota Yogyakarta.

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Metode deskriptif statistik

Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

b. Metode analisis regresi linear berganda ,

Metode ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus yaitu dalam bentuk langsung dan tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta. Dengan regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Deskriptif

a. Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1
Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	110	1,83	4.83	3.806	0.572
Sanksi Perpajakan	110	1.00	5.00	3.536	0.941
Pengetahuan Perpajakan	110	1.71	4.86	3.478	0.683
Pelayanan Fiskus	110	2.57	4.56	3.690	0.355
Kepatuhan Wajib Pajak	110	2.57	4.71	3.832	0.418

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak memiliki penilaian yang tinggi terhadap kesadaran wajib pajak, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,70 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti kesadaran wajib pajak berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara, dengan membayar pajak bumi dan bangunan berarti ikut membangun daerah, penerimaan dari sektor pajak bumi dan bangunan merupakan pendapatan daerah yang sangat potensial, penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu penerimaan yang penting bagi pembangunan daerah, dan pajak bumi dan bangunan sifatnya memaksa dan ditetapkan oleh undang-undang.

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap sanksi perpajakan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,56 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti sanksi perpajakan berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena sanksi yang diberikan atas pelanggaran membayar pajak sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, sanksi tidak kenal kompromi, dan tidak membedakan wajib pajak, serta dapat memberikan efek jera.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap pengetahuan perpajakan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,57 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti pengetahuan perpajakan berada dalam

kriteria yang tinggi. Hal ini berarti wajib pajak merasakan wajib pajak mengetahui tentang pajak, karena mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya, mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat, mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar, serta mengetahui bahwa dalam Undang- Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap pelayanan fiskus, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,83 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti pelayanan fiskus berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena petugas pajak memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak, memberikan kemudahan kepada wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajaknya, petugas pajak memberikan pelayanan dengan baik, cepat, dan tepat, serta selalu berpenampilan rapi dalam

melayani wajib pajak sehingga memberikan kenyamanan kepada wajib pajak.

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan dari 110 wajib pajak di Kota Yogyakarta memiliki penilaian yang tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 3,83 yang berada pada interval 3,41 – 4,20, yang berarti kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berada dalam kriteria yang tinggi. Hal ini disebabkan karena wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan pajak yang berlaku, Saya selalu mengisi surat pemberitahuan objek pajak dengan lengkap dan benar, selalu membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu, pernah tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu pernah tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu, tidak pernah memiliki tunggakan pajak, dan menyerahkan surat pemberitahuan objek pajak yang sudah terisi ke Dinas Pendapatan Daerah.

b. Model Persamaan

Untuk melihat hasil analisis pengaruh dari keempat variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) terdapat pada tabel dibawah

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Independen	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas
Konstanta	0.498		.210
Kesadaran wajib pajak	0.206	1.261	0.000
Sanksi perpajakan	0.165	3.984	0.000
Pengetahuan perpajakan	0.219	5.281	0.000
Pelayanan Fiskus	0.315	4.968	0.000
F hitung		26.471	
R ²		0.502	

Sumber : Data hasil regresi, 2017.

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

$$Y = 0,498 + 0,206 X_1 + 0,165 X_2 + 0,219 X_3 + 0,315 X_4$$

c. Koefisien Determinan (R²) dan Uji F
Koefisien determinasi berganda menunjukkan besarnya persentase pengaruh semua variabel bebas terhadap nilai variabel

terikat. Besarnya koefisien determinasi dari nol sampai satu. Semakin mendekati nol besar koefisien determinasi, maka semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel

terikat. Sebaliknya semakin mendekati 1, semakin besar pula pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari Tabel 4.10 juga dapat diketahui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,502. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,502, maka dapat diartikan bahwa 50,2% Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Sedangkan sisanya sebesar 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

d. Uji t

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui nilai t_{hitung} dan nilai probabilitasnya untuk masing-masing variabel bebasnya telah diketahui dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dengan cara membandingkannya dengan tingkat signifikansi 0,05.

a. Pengujian t hitung pada Variabel Kesadaran Wajin Pajak (X_1)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 3,984 dan t_{tabel} sebesar 1,6595 yang berarti $3,984 > 1,6595$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel kesadaran wajib pajak secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **dengan demikian hipotesis pertama terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Banyu Utomo (2011) menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengujian t hitung pada Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X_2) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 5,281 dan t_{tabel} sebesar 1,6595 yang berarti $5,281 > 1,6595$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel sanksi perpajakan secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **dengan demikian hipotesis kedua terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Laura Yohana, (2016) tentang menunjukkan bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengujian t hitung pada Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_3)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_3) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 4,968 dan t_{tabel} sebesar 1,6595 yang berarti $4,968 > 1,6595$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, **dengan demikian hipotesis ketiga terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Banyu Utomo, (2011) menunjukkan secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Pengujian t hitung pada Variabel Pelayanan Fiskus (X_4)

Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus (X_4) terdapat nilai t_{hitung} sebesar 3,875 dan t_{tabel} sebesar 1,6595 yang berarti $3,875 > 1,6595$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_0 ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh variabel pelayanan fiskus secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, **dengan demikian hipotesis keempat terbukti.**

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam dan Dewi, (2015) menunjukkan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sikap

tertib peraturan, pemahaman tentang pajak, tidak menunggak pembayaran, dan kepercayaan penuh terhadap aparat pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tidak harus menjadi ahli perpajakan masyarakat hanya harus mengetahui dahulu hal mendasar tentang pajak, mengetahui cara membayar pajak, cara menghitung pajak, sanksi pajak, dll. Ini berarti semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhannya masyarakat kota Yogyakarta juga semakin tinggi. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat.

- Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.
- Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak PBB diantaranya dalam menentukan PBB, penetapan SPPT telah adil sesuai dengan yang seharusnya, fiskus memperhatikan terhadap keberatan terhadap pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak di bidang perpajakan khususnya PBB dan kemudahan dalam pembayaran PBB. Hal ini berarti semakin baik pelayanan fiskus maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.

REFERENSI

- Anna Pertiwi. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib perpajakan ((Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees). Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Andi Abdillah. 2015. Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dispenda Kota Makasar. Universitas Hasanuddin.
- Apriani Purnamasari, Sukirman, dan Umi Pratiwi. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB:P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung, 2016.
- Aprilia Permatasari dan P. D'yan Yaniartha. 2012. Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Universitas Udayanan Bali.
- Aulia Rahmanita. 2017. Pengaruh Pelayanan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Arief Rachman. 2009. Pengaruh pemahaman, kesadaran, serta kepatuhan wajib pajak PBB terhadap keberhasilan penerimaan PBB di kecamatan kota Sumenep kabupaten Sumenep.
- Banyu Ageng Wahyu Utomo. 2011. Pengaruh Sikap, kesadaran wajib Pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan pamulang kota

- Tangerang Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Christella Pradista Riyana dan Putri Erly Suandy. 2015. Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak hotel melati di Kota Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra Tax & Accounting Review* volume 1 nomor 13.
- Doni Sapriadi. 2013. Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada kecamatan Selupu Rejang. Program studi akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Eken Patmasari, Trimurti, dan Suhendro. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. *Seminar Nasional IENACO – 2016* ISSN: 2337 – 4349
- Fitriana Suwardi. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
- Hana Oktaviani. 2011. Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Harjanti Puspa Arum. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap).
- Imam Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Imam Oktafiyanto dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi* Volume 3 Nomor 1 Juni 2015.
- Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, Wayan Cipta. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurusan Manajemen Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia*.
- Kadek Suciningsih, I Wayan Bagia, Wayan Cipta. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Komang Sastra Guna Wiratama, Siti Khairani dan Icha Fajriana. 2015. Pengaruh tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pekerjaan wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (studi kasus wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Palembang Ilir Barat).
- Laura Yohana. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas

- Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kota Bukittinggi.
- Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia.
- Leni Samira. 2015. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal AKUNIDA* volume 1 nomor 1, Juni 2015
- Nafilah. 2013. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin*.
- Lian Ade Saputra, Rika Kharlina Ekawati, dan Icha Fajriana. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. *STIE MDP Palembang*.
- Nilia Puspita. 2014. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Kecamatan Padang Utara). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Lusia Rohmawati, Prasetyono, dan Yuni Rimawati. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura*.
- Nur Murdliatin, Siti Ragil, dan Handayani Sunarti. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di unit pelaksana teknis dinas pendapatan provinsi Jawa Timur Malang Kota. *Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB)*|Vol. 5 No. 2 2015.
- Meri Tiara dan Siti Khairani. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak restoran terhadap self assessment system studi kasus di dinas pendapatan kota Palembang.
- Pertiwi Kundalini. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten Temanggung tahun 2015. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Muhammad Sairi, Taufik Kurrohman, dan Andriana. 2014. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo.
- Purwanti. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Muslikhatul Ummah. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, Pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Fakultas Ekonomi*
- Riza Aditya, Anwar Made, dan Eris Dianawati. 2016. Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara. *Universitas Kanjuruhan Malang*.

- Risky Widowati. Kepatuhan Wajib Pajak melalui sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, dan Pelayanan Fiskus. *Falkutas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang*.
- Siska Noviyanti, Rizal Effendi, dan Christina Yunita W. 2015. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan ketegasan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP (studi kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang).
- Soraya, Dhabtun Nafsi. 2014, Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah NO.46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sri Putri Tita Mutia. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi. (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Universitas Negeri Padang.
- Surya Arisman. 2015. Analisis pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Takalar. Universitas Hasanuddin Makasar.
- Zepri Dwi Yuwono. 2015. Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri. Universitas Nusantara PGRI Kediri.



PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK), DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN

Suyanto*
Ika Septiani Putri

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
 *email: iyantsuyanto@gmail.com

ABSTRACT

This research aim to know the influence of Perception taxpayers on tax amnesty and motivation to pay taxes toward Taxpayer Compliance at Regional Office Directorate General of Taxation Wonosari, Gunungkidul. The sample collection technique used in this research was convenience sampling, data analysis techniques used in this research were multiple linear regression. This research result indicated: Perception taxpayers on tax amnesty not had influence positive and significant toward Taxpayer Compliance it is proven by the value of tamount < ttable (1,386 < 1,9901) and significantly 0,170 > 0,05,, Motivation to Pay Taxes influence has positive and significant toward Taxpayer Compliance it is proven by the value of tamount > ttable (2,125 > 1,9901) and significantly 0,037 < 0,05, Perception taxpayers on tax amnesty and Motivation to Pay Taxes has positive and significant toward Taxpayer Compliance it is proven by the value of Famount > Ftable (4,829 > 3,11) and significantly 0,010 < 0,05..

INFO ARTIKEL

Diterima: 18 April 2017
 Direview: 18 April 2017
 Disetujui: 12 Juni 2017
 Terbit: 13 Juni 2017

Keyword:

Perception taxpayers on tax amnesty, Motivation to Pay Taxes, and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pemerintah menetapkan target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai 75 persen atau sebesar Rp 1.360,2 triliun dalam kebijakan APBN 2016, akan tetapi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak di Negara Indonesia semakin menurun. Voluntary compliance (kepatuhan sukarela) adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dari wajib pajak sendiri. Voluntary compliance didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak

terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan memiliki kepatuhan sukarela apabila wajib pajak memiliki sifat langsung menuruti tanpa perlu menunggu adanya tindakan pemaksaan dalam hal melakukan kewajibannya (Sari dan Mangoting ,2014).

Di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2015 terdapat wajib pajak sebanyak 44.106 yang terdaftar. Akan tetapi hanya sebanyak 26.933 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten Gunungkidul hanya sebesar 61%. Pada tabel 1.1 berikut ini dapat terlihat

jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Tabel 1
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Dan Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Pada KPP Pratama Wonosari

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2012	32.451	23.765	73%
2013	34.096	23.681	69%
2014	39.815	24.806	62%
2015	44.106	26.933	61%

Sumber: KPP Pratama Wonosari, tanggal proses data 06 Desember 2016

Seperti terlihat pada tabel 1.1 jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT yang semakin menurun per tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 32.451 dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 23.765. Dengan demikian persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun

2012 adalah 73%. Pada tahun 2013 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 69%, dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 34.815, dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 23.681. Demikian pula di tahun-tahun berikutnya persentase tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkup kerja KPP Pratama wonosari terus menurun hingga mencapai 61%.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak mendekati tercapai. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Dirjend pajak, salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Tax amnesty (pengampunan pajak).

Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa Tax amnesty memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan

wajib pajak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tax amnesty ini bila diterapkan dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, akan tetapi kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak patuh, bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat (Ragimun, 2014).

Selain dengan menetapkan kebijakan tax amnesty, pemerintah khususnya Dirjen pajak terus meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012), menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Memberikan bukti bahwa Motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi motivasi seorang wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar (Putri, 2015). Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan kebijakan tax amnesty dan motivasi membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Persepsi Wajib Pajak Tentang Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Menurut UU No. 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan. Tax amnesty adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah tawaran untuk melunasi utang pajak yang luar biasa untuk jumlah yang kurang bayar dari utang saat ini. Dengan kata lain, kebijakan ini berarti memungkinkan wajib pajak untuk membayar utang pajak yang belum dibayar, sesuai dengan keadaan wajib pajak tanpa menimbulkan biaya keterlambatan dan denda lainnya (Wisegeek, 2014).

Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa Tax amnesty memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tax amnesty ini bila diterapkan dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) merupakan anggapan, pandangan, dan interpretasi masing-masing wajib pajak mengenai kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak). Persepsi seseorang untuk membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut (Jatmiko, 2006). Kepatuhan Wajib Pajak sangat terkait dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap kebijakan itu sendiri.

Tax amnesty merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, membayar uang tebusan sebagai penalty, tidak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan penerimaan bagi negara dan mendorong kepatuhan sukarela. Dengan kesempatan yang ditawarkan, maka wajib pajak memohon ampun kepada pemerintah atas ketidakjujuran pengisian SPT dan berjanji

untuk menjadi patuh. Tax amnesty dalam jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya kebijakan amnesti pajak. Jika persepsi masyarakat dengan adanya kebijakan amnesti pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh.

Persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Demikian pula dengan pelaksanaan kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak). Jika persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan tax amnesty (pengampunan pajak) positif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa tax amnesty memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Motivasi Membayar Pajak

Menurut Caroko (2015) motivasi wajib pajak merupakan daya dorong yang ada pada wajib pajak secara eksternal maupun internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga membayarkan pajak terutangnya. Teori Atribusi menjelaskan bahwa motivasi seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan oleh faktor eksternal yang bersumber dari luar diri individu dan faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu tersebut.

Motivasi adalah konsep yang abstrak, untuk dapat mengukur pengaruhnya terhadap perilaku dilakukan dengan menduga (inferred) dan memanipulasi gejalanya (manipulated) yang berhubungan dengan perilaku. Motivasi yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi intensitas wajib pajak dalam mengisi dan memasukkan Surat pemberitahuan Pajak (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Banyaknya SPT yang dimasukkan ke KPP berpengaruh terhadap besarnya nilai rupiah dana yang terhimpun dan jumlah wajib pajak yang terjaring. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh motivasi membayar pajak dapat diukur berdasarkan jumlah rupiah dana yang terhimpun dan jumlah wajib pajak yang terjaring dari sektor perpajakan.

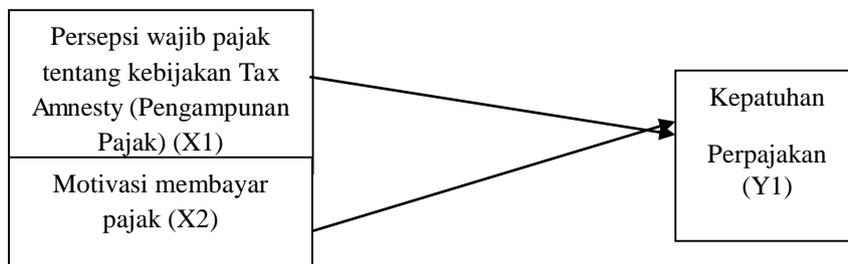
Menurut Syah (1997:136), motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu, motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, dan motivasi ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja, baik pada diri individu maupun kekuatan yang berada diluar individu sehingga individu tersebut memahami keadaan

dirinya untuk mengarahkan dan menggerakkan tingkah lakunya untuk membayar pajaknya untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ini kebutuhan yang mendasari diri seorang untuk bertindak dan memberikan sumbangannya pada Negara pada sasaran pencapaian tujuan.

Adanya motivasi dalam hal membayar pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga semakin meningkat Putri (2016). Hasil penelitian ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Motivasi Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2 : Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan yang berada di lingkup kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari. Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2015 terdapat 50.252 wajib pajak yang terdaftar baik orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Convenience sampling. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) Convenience sampling adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari beberapa responden. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Wajib Pajak yang berada di lingkup kerja KPP Pratama Wonosari. Pengumpulan data akan dilakukan oleh peneliti dengan membagikan kuesioner pada responden. Kuesioner yaitu merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan di bagikan kepada responden yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bobot penilaian angka hasil kuesioner dalam penelitian ini sesuai dengan yang digambarkan dalam skala ordinal, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Indriantoro dan Supomo, 2002). Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty	83	11	30	24.17	4.276
Motivasi Membayar Pajak	83	16	25	21.73	2.301
Kepatuhan Perpajakan	83	9	25	20.84	2.407

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah $Y = 13,014 + 0,089 X_1 + 0,255 X_2 + \epsilon$.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		83
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.31158756
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.096
	Negative	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		1.175
Asymp. Sig. (2-tailed)		.127

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Persepsi WP Tentang Kebijakan Tax Amnesty	0,879	1,138
Motivasi Membayar Pajak	0,879	1,138

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Persepsi WP Tentang Tax Amnesty	0,643	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Motivasi Membayar Pajak	0,543	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Tabel 6
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.014	2.540	.000	5.123	.000
Persepsi WP tentang Tax Amnesty	.089	.064	.170	1.386	.170
Motivasi membayar pajak	.255	.120	.037	2.125	.037

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Nilai signifikansi dari variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty sebesar 0,170 atau lebih dari 0,05, dengan kata lain Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty tidak signifikan, hal ini berarti bahwa data mendukung H₀ dan tidak mendukung H_a. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alm, Mckee dan Beck (1990) dalam Wardiyanto (2008), dan Alm, James dan Beck (1993). Variabel motivasi membayar pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,037. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty secara psikologis tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak karena kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai tujuan dari ditetapkan kebijakan ini. Selain itu, dengan adanya kebijakan tax amnesty ini wajib pajak menganggap kebijakan ini tidak adil bagi wajib pajak yang selama ini patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga

wajib pajak belum tentu lebih tertib membayar pajak.

Nilai t-hitung pada variabel ini sebesar 2,125 dan nilai t-tabel sebesar 1,9901. Dengan demikian data dapat mendukung H_a dan tidak mendukung H₀, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kepatuhan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, semakin tinggi motivasi membayar pajak terhadap kebijakan dalam perpajakan maka tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin tinggi. Hal ini karena wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga pemikiran dengan membayar pajak maka kemajuan pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan baik Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Putri (2016), Maryati (2014), dan Sulistyono (2012).

Tabel 4.13
Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	52.898	2	26.449	4.829	.010 ^a
1 Residual	438.162	80	5.477		
Total	491.060	82			

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Uji statistik F menghasilkan F hitung sebesar 4,829 dengan tingkat signifikansi nilai probabilitas 0,010, nilai F hitung lebih besar dari F tabel (3,11), maka dengan hasil ini model regresi dapat digunakan untuk memprediksi bahwa Persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty, dan motivasi wajib pajak, secara simultan.

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.328 ^a	.108	.085	2.340

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Nilai adjusted R square sebesar 0,085. Hal tersebut berarti sebesar 8,5% Kepatuhan Perpajakan dipengaruhi oleh Persepsi Wajib Pajak tentang kebijakan Tax Amnesty dan Motivasi Wajib Pajak sedangkan sebesar 91,5% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel yang telah digunakan oleh peneliti.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari mengenai Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty, dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan, menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan, dan Motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

REFERENSI

- Ngadiman dan Huslin (2015). "Pengaruh Sunset policy, Amnesti pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)". *Jurnal Akuntansi*. Volume XIX. No. 02, Mei 2015: 225-241.
- Ragimun.2015. "Analisis Implementasi Amnesti pajak di Indonesia". Tersedia di : www.kemenkeu.go.id (diakses pada 24 Maret 2016)
- Wardiyanto, Bintoro (2008). "Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy berdasarkan UU No 28 tahun 2007]". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th. XXI. No. 4, Oktober–Desember 2008, 328–335.
- Aryobimo, Putut Tri 2012. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)". Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Turkey". Celal Bayar University School Of Applied Sciences, Manisa, Turkey.

- Arum, Harjanti Puspa 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". Program S1. Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Suryarini, Trisni dan Syaiful Anwar 2010. "Dampak Kebijakan Sunset policy terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Kpp Semarang Barat". *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.2 No.2 September 2010.
- Syah, Muhibbin. "Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru", Rosda, Bandung, 1997.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2011. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. Vol. 6 No. 1.
- Alm. James. Vazquez, Jorge Martinez, dan Wallace, Sally. 2009. "Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation". *Economic Analysis & Policy*, Vol. 39 No. 2.
- Bose, Pinaki. Jetter, Michael. "A Tax Amnesty in the Context of a Developing Economy".
- Gerger, Gunes Cetin. 2016. "Tax Amnesties And 2010 Tax Amnesty Evaluation In



FEE AUDIT SEBAGAI MEDIASI PENGARUH KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA (ANALISIS JALUR)

Widarti*

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
 Universitas Tamansiswa Palembang
 *email: widartisuhaimi32@gmail.com

ABSTRACT

Generally, people judge that KAP is included in the big four audit quality is better than non big four accounting firm. Auditors receive audit fee in exchange for professional services they provide to the company. Audit fee is the cost to the client for having had the audit services of an accounting firm. Is the high audit fees can be a mediating influence on earnings management audit kualitas. By using linear regression analysis and the Path Analysis results showed that simultaneous audit quality and audit fee does not significantly affect earnings management with Value sig 0.130 $p >$ level of sig 0,05. dan t test showed that the quality of the audit and the audit fee no significant effect on earnings management by each p value 0.089 and 0.690 sig is greater than 0.05. Based on the analysis path shows that audit fee can not be mediating the effect of audit quality on earnings management. It can be seen from the value of the t statistic - 3,288 $<$ t table with a significant level of 0.05 is equal to 1,666 and the coefficient of mediation amounted to -343 958 not signifikan which means there is no mediation effect of audit fees in relation to audit quality on earnings management.

INFO ARTIKEL

Diterima: 30 Maret 2017
 Direview: 31 Maret 2017
 Disetujui: 13 Juni 2017
 Terbit: 14 Juni 2017

Keywords:

earnings management, path analysis

PENDAHULUAN

Manajemen laba dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat terhadap manajemen tersebut serta menyedatkan pemegang saham atau pemilik serta pengguna laporan keuangan lainnya. Pada dasarnya manajemen laba tidak begitu saja menyalahi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Manajemen laba terjadi karena adanya fleksibilitas standar akuntansi keuangan untuk menggunakan asumsi, penilaian, serta pemilihan metode perhitungan dalam penyusunan laporan keuangan yang

memungkinkan manajemen discretion dalam akuntansi akrual.

Hal ini membuat perusahaan memerlukan jasa seorang akuntan publik (selanjutnya disebut sebagai auditor). Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, auditor berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Selama ini kualitas audit kebanyakan dikaitkan dengan KAP yang ditugaskan melakukan audit. KAP dibagi menjadi KAP yang termasuk dalam big four dan non big four. Umumnya, masyarakat menilai bahwa KAP yang termasuk dalam big four memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP non big four. Pemilihan KAP oleh manajemen atau pemilik perusahaan adalah untuk melakukan proses audit atas kinerja keuangan perusahaannya. Dalam hubungannya KAP akan bekerja secara profesional untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam menjaga reputasinya. Sedangkan manajemen ingin mendapatkan tingkat akuntabilitas yang tinggi atas kinerja keuangannya dari hasil audit KAP yang berkualitas. Kualitas audit yang dilakukan oleh KAP yang reputasinya baik akan lebih menjamin tentang akuntabilitas kinerja keuangan perusahaan yang diauditnya.

Auditor menerima fee audit sebagai imbalan atas jasa profesional yang mereka berikan kepada perusahaan. Fee audit adalah biaya yang harus ditanggung klien karena telah mendapatkan jasa audit dari sebuah KAP. Fee audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Besarnya fee dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Auditor yang mampu memberikan kualitas yang lebih baik seharusnya menerima bayaran yang lebih tinggi sebagai imbalan. Tetapi dalam kenyataannya justru fee audit yang lebih tinggi membuat bias antara hubungan auditor dengan klien. Hal ini membuat auditor cenderung tidak independen ketika mendeteksi manajemen laba. Hal inilah yang membuat pertanyaan apakah mungkin fee audit mampu mempengaruhi hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kualitas Audit

Menurut (De Angelo, 2004) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut

:“kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan bergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut”

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa KAP yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil. KAP yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan kepercayaan klien.

Di Indonesia, beberapa penelitian lainnya juga menggunakan ukuran kantor akuntan publik sebagai proksi kualitas audit seperti penelitian yang dilakukan oleh Nuraini dan Sumarno Zain (2007). Mereka mengasumsikan bahwa auditor KAP BIG4 memiliki kualitas audit relatif lebih baik dibandingkan dengan auditor KAP non BIG4.

Fee Audit

Audit fee adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya tenaga yaitu manager, supervisor, auditor junior dan auditor senior. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya percetakan, biaya penyusunan komputer, gedung dan asuransi. Setelah dilakukan perhitungan biaya pokok pemeriksaan maka akan dilakukan tawar menawar antar klien yang bersangkutan dengan kantor akuntan publik. (Halim,2008), menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya audit fee yaitu: a. Besar kecilnya auditee. b. Lokasi Kantor Akuntan Publik (KAP). c. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Manajemen Laba

Standar akuntansi memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menjadikan laporan

keuangan menjadi kurang andal (reliable). Keterbatasan tersebut diantaranya adalah fleksibilitas penerapan metode akuntansi yang menyebabkan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektifitas dalam menyusun metode akuntansi yang dipilih dan penentuan waktu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat discretionary dapat dipergunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi laba, yaitu dengan mempercepat atau menunda pengeluaran-pengeluaran tersebut dan menggesernya pada periode yang lain. Keterbatasan laporan keuangan inilah yang menyebabkan terjadinya aktivitas manajemen laba (earnings management) oleh pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Secara umum, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008).

Motivasi adalah suatu bentuk dorongan yang menjadi penggerak utama seseorang atau organisasi untuk mencapai apa yang diinginkannya. Motivasi untuk melakukan manajemen laba biasanya timbul akibat "pressure" baik dari dalam maupun dari luar perusahaan biasanya berhubungan dengan kinerja keuangan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan. Ada 4 motivasi menurut (Sulistyanto, 2008) Motivasi Pasar Modal, Penawaran Saham Perdana, Motivasi Kontraktual, Motivasi Regulasi, Upaya Manajerial dalam Melakukan Manajemen Laba

Ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk mempengaruhi besar kecilnya laba menurut (Sulistyanto, 2008) yaitu :

1. Mengakui pendapatan masa depan menjadi pendapatan periode berjalan
2. Mengakui pendapatan periode berjalan menjadi pendapatan periode sebelumnya
3. Mencatat pendapatan palsu
4. Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lambat
5. Tidak mengungkapkan semua kewajibannya

Pendekatan Untuk Mendeteksi Manajemen Laba

Sulistyanto (2008) pendekatan yang telah dihasilkan oleh para peneliti untuk mendeteksi manajemen laba diantaranya :

Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones (1991), model ini menggunakan dua asumsi sebagai dasar pengembangan. Pertama; Akrua periode berjalan (current accruals), yaitu perubahan dalam rekening modal kerja, merupakan hasil dari perubahan yang terjadi di lingkungan ekonomi perusahaan yang dihubungkan dengan perubahan penjualan, sehingga semua variabel yang digunakan akan dibagi dengan aktiva atau penjualan periode sebelumnya. Kedua; Gross property, plant, and equipment merupakan salah satu komponen utama yang digunakan untuk menghitung total akrual, khususnya untuk biaya depresiasi nondiscretionary.

Atas dasar asumsi di atas, untuk menghitung total akrual, model ini menghubungkan total akrual dengan perubahan penjualan dan gross property, plant, and equipment. Sementara untuk menghitung nondiscretionary accruals di tahun peristiwa model ini merumuskan sebagai berikut :

$$NDA_t = \alpha_1(1/(A_{t-1})) + \alpha_2(\Delta REV_t/(A_{t-1})) + \alpha_3(PPE_t/(A_{t-1}))$$

Dimana:

A_{t-1} = total assets perusahaan i pada periode t-1

ΔREV_t = perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t - 1 ke tahun t

PPE_t = aktiva tetap perusahaan pada periode t

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = koefisien regresi

Estimasi $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ dihitung selama periode estimasi dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$(TAC_t/(A_{t-1})) = \alpha_1(1/(A_{t-1})) + \alpha_2(\Delta REV_t/(A_{t-1})) + \alpha_3(PPE_t/(A_{t-1}) + v_t)$$

Dimana: $TAC_t = \text{Total accruals}$

Model Jones Dimodifikasi

Model Jones dimodifikasi (modified jones model) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan discretionary accruals ketika dicretion melebihi pendapatan. Model ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dan memberikan hasil paling robust. Sama halnya model manajemen laba berbasis berbasis aggregate accruals yang lain model ini menggunakan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Model Jones dimodifikasi dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Menghitung nilai accrual dengan persamaan:

Total Accrual (TAC) = laba bersih setelah pajak (net income) – Arus kas dari aktivitas operasi (cash flow from operating)

2. Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi Ordinary Least Square (OLS)

$$(TAC_t/(A_{t-1})) = \alpha_1(1/(A_{t-1})) + \alpha_2(\Delta REV_t/(A_{t-1})) + \alpha_3(PPE_t/(A_{t-1})) + e$$

Dimana:

TAC_t = total accruals perusahaan i pada periode t

A_{t-1} = total assets perusahaan i pada periode t-1

ΔRev_t = perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t – 1 ke tahun t

PPE_t = aktiva tetap perusahaan pada periode t

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = koefisien regresi

3. Dengan nilai koefisien regresi di atas, kemudian menghitung nilai nondiscretionary accruals.

$$NDA_t = \alpha_1(1/(A_{t-1})) + \alpha_2((\Delta REV_t - \Delta REC_t)/A_{t-1}) + \alpha_3(PPE_t/(A_{t-1}))$$

Dimana:

NDA_t = nondiscretionary accruals perusahaan i pada periode t

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total accruals.

ΔRec_t = perubahan piutang perusahaan i pada periode

4. Menghitung discretionary accruals :

$$DA_t = (TAC_t/(A_{t-1})) - NDA_t$$

Dimana:

DA_t = discretionary accruals perusahaan i pada periode t

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu kualitas audit, terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba, dengan fee audit sebagai variabel intervening. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan consumer goods yang terdaftar dibursa efek Indonesia pada tahun 2011-2014

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan consumer goods sesuai dengan kelompok industrinya yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan yang digunakan adalah tahun 2012-2015. Penentuan sampel perusahaan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel penelitian:

1. Perusahaan listed (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2014 dan tidak delisting selama periode penelitian.
2. Menerbitkan laporan keuangan auditan (audited financial statement) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

setiap tahunnya secara berturut-turut dalam periode 2012-2015.

3. Mencantumkan professional fee dalam laporan keuangannya.
4. Mencantumkan nama KAP yang mengaudit laporan keuangannya.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Independen

Variabel independen (independent variable) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen (X1) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Kualitas

Audit sebagai variabel independen dalam penelitian diproksikan dengan ukuran kantor akuntan publik yang diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu nilai 0 untuk KAP non BIG4 dan nilai 1 untuk KAP yang berafiliasi dengan KAP BIG4 internasional. Dengan mengasumsikan bahwa auditor KAP BIG4 memiliki kualitas audit relatif lebih baik dibandingkan dengan auditor KAP non BIG4.

Variabel Intervening

Variabel intervening (X2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah fee audit. Data tentang fee audit akan diambil dari akun professional fees yang terdapat dalam laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartadi (2009).

Variabel Dependen

Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan discretionary accruals. Pengukuran variabel manajemen laba menurut modified jones models.

Adapun persamaan untuk menguji pengaruh kedua variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Manajemen laba

X1 : Kualitas audit

X2 : Fee audit

β_1, β_2 : Koefisien masing-masing variabel

e : Error

Analisis regresi linier berganda dan analisis jalur digunakan dalam penelitian ini. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi berganda, atau dengan kata lain analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Persamaannya antara lain adalah sebagai berikut:

$$X_2 = \beta_1 X_1 + e_1$$

Keterangan:

X1 : Kualitas audit

X2 : Fee audit

β_1, β_2 : Koefisien masing-masing variabel

e_1, e_2 : Error

Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk menentukan apakah seluruh variabel penelitian layak untuk diuji dengan regresi berganda. Pengujian tersebut dinamakan Uji Asumsi Klasik. Empat uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian Statistik Deskriptif

Analisis statistik Deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang suatu data meliputi : minimum, maksimum, mean, standar deviasi. Adapun data variabel dalam penelitian ini adalah Kualitas Audit, Manajemen Laba, dan Fee Audit. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh output analisis deskriptif sebagai berikut :

Tabel 1
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Manajemen Laba	-.00093	.091720	72
Kualitas Audit	.61	.491	72
Fee Audit	7.70792639E1	1.462049205E2	72

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 tahun, yang diambil dari laporan keuangan perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari periode 2012 sampai dengan 2015. Dari tabel dapat dijelaskan bahwa ;

1. Manajemen Laba menunjukkan jumlah sampel (N) ada 72, dari 72 sampel ini nilai rata-rata (mean) sebesar -0.00093 dan standar deviasi sebesar 0.091720.
2. Kualitas Audit menunjukkan jumlah sampel (N) ada 72, dari 72 sampel ini nilai rata-rata (mean) sebesar 0.61 dan standar deviasi sebesar 0.491.

3. Fee Audit menunjukkan jumlah sampel (N) ada 72, dari 72 sampel ini nilai rata-rata (mean) sebesar 7.70792639 dan standar deviasi sebesar 1.462049205.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Ghozali (2012) menyebutkan bahwa, uji normalitas menggunakan grafik bisa saja menyesatkan karena secara visual bisa saja terlihat normal padahal secara statistic bisa saja sebaliknya. Untuk itu, dalam penelitian ini juga dilakukan uji Kolmogorov-smirnov yang hasil pengujiannya akan ditampilkandalam tabel 2 berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08905079
Most Extreme Differences	Absolute	.138
	Positive	.138
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		1.174
Asymp. Sig. (2-tailed)		.127

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat kita lihat bahwa variabel pengganggu atau residual memiliki nilai asymptotic significant sebesar 0.127 (lebih besar dari 0.05) yang mengindikasikan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 3 dibawah ini dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk variabel

Kualitas Audit (X1) Fee Audit (X2) masing-masing adalah 0,866 dan 0,866 atau lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk variabel Kualitas Audit (X1) Fee Audit (X2)) masing-masing adalah 1,155 dan 1,155 lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan dalam persamaan regresi ini tidak terjadi multikoleniaritas.

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kualitas Audit	.866	1.155
	Fee Audit	.866	1.155

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.060	.015		4.115	.000
	Kualitas Audit	.010	.017	.074	.577	.566
	Fee Audit	-5.669E-5	.000	-.129	-1.014	.314

a. Dependent Variable: ABS

Berdasarkan ouput diatas menunjukkan bahwa semua nilai variabel melebihi angka signifikan 0.05 hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Menurut Triasdini (2010) untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 5
Kriteria Pengujian Durbin-Watson

Ho	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Terdapat autokorelasi negative	Tolak	$d > 4-dl$
Terdapat autokorelasi positif	Tolak	$d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif dan negative	Tidak Tolak	$du < d < (4-du)$

Berdasarkan tabel 6 dibawah ini didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi adalah 2.125, lalu akan dibandingkan dengan nilai dl dan du yang diperoleh dari tabel Durbin Watson. Untuk jumlah sampel sebanyak (n) = 72

dengan $k = 2$ (k adalah jumlah variabel independen), maka diperoleh nilai dl sebesar 1.5323 dan du sebesar 1.7054 dan nilai 4-dl dan du (2.4677 dan 2.2946).

Tabel 6
Hasil Ujia Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.239 ^a	.057	.030	.090332	2.125

a. Predictors: (Constant), Fee Audit , Kualitas Audit

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

Analisis Regresi Linier berganda

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.021	.020		1.042	.301
	Kualitas Audit	-.040	.023	-.216	-1.724	.089
	Fee Audit	3.157E-5	.000	.050	.401	.690

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

Berdasarkan Tabel 7 diatas dengan memperhatikan angka yang berbeda pada kolom Unstandardized coefficient Beta, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta 1 X_1 + \beta 2 X_2 + e$$

Manajemen Laba

$$= 0.021 + (-0.040) KA + 3.157 FE + e$$

Dari persamaan regresi berganda diatas maka dapat di interprestasikan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Nilai (constant) menunjukkan nilai sebesar 0.021 artinya bahwa Manajemen Laba memiliki nilai 0.021 jika variabel seperti Kualitas Audit dan Fee Audit adalah tidak ada.
 2. Variabel Kualitas Audit memiliki koefisien regresi sebesar -0.040. yang artinya jika kenaikan nilai Kualitas Audit sebanyak 1, maka akan menyebabkan penurunan Manajemen Laba sebesar -0.040, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.
- Variabel Fee Audit memiliki nilai koefisien regresi sebesar 3.157 yang menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan nilai Fee Audit sebanyak 1, maka akan menyebabkan nilai Manajemen Laba juga akan naik sebesar 3.157, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

Uji Simultan (Uji F)
Tabel 8
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.034	2	.017	2.099	.130 ^a
	Residual	.563	69	.008		
	Total	.597	71			

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit , Fee Audit

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

Dari hasil uji F pada tabel 8 diperoleh p value sig (0,130) > level of sig (0,05). Hal ini berarti bahwa Kualitas Audit, Fee Audit secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap Manajemen Laba.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9
Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.021	.020		1.042	.301
	Kualitas Audit	-.040	.023	-.216	-1.724	.089
	Fee Audit	3.157E-5	.000	.050	.401	.690

a. Dependent Variable: Manajemen Laba

- Berdasarkan tabel 9 diatas menyatakan bahwa :
1. Menunjukkan bahwa p value sig (0,089) > level of sig (0,05). Hal tersebut menyatakan bahwa Kualitas Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba
 2. Menunjukkan bahwa p value sig (0,690) > level of sig (0,05). Hal tersebut menyatakan Fee Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba.

Koefisien Determinasi (R²)

Dari tabel Model Summary tabel 10 dapat diketahui nilai R² (adjusted R square) adalah 0,030. Jadi sumbangan pengaruh dari variabel

independen yaitu 3,0 %, sedangkan sisanya 97 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 10
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.239 ^a	.057	.030	.090332

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Fee Audit

b. Dependent Variable: Manajemen Laba

Hasil Uji Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis Jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh mediasi Fee Audit dalam hubungannya kualitas audit terhadap manajemen laba. Untuk analisis tersebut akan menggunakan

hasil dari regresi persamaan 1 dan regresi persamaan 2. Hasil regresi persamaan 1 dapat dilihat dari tabel 8,9 dan 10 dan hasil dari regresi persamaan 2 dapat di lihat dari tabel berikut ini.

Tabel 11
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.366 ^a	.134	.121	1.370386892E2

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit b.

Dependent Variable: Fee Audit

Tabel 12
NOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	203115.231	1	203115.231	10.816	.002 ^a
	Residual	1314572.163	70	18779.602		
	Total	1517687.394	71			

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit

b. Dependent Variable: Fee udit

Tabel 13
Coefficients

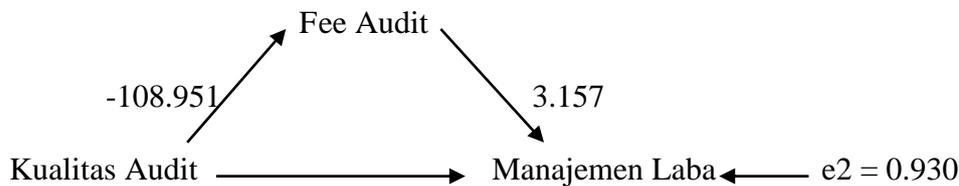
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	143.661	25.898		5.547	.000
	Kualitas Audit	-108.951	33.129	-.366	-3.289	.002

a. Dependent Variable: Fee udit

Hasil output SPSS pada persamaan (1) memberikan standardized beta Kualitas Audit sebesar -0.040 dan Fee Audit sebesar 3.157 semuanya tidak signifikan. Nilai koefisien unstandardized beta Kualitas Audit -0.040 merupakan nilai jalur p1 dan nilai unstandardized beta Fee Audit 3.157 merupakan nilai jalur p3. Pada output SPSS pada persamaan

(2) memberikan standardized beta Kualitas Audit sebesar -108.951 dan signifikan yang berarti Kualitas Audit mempengaruhi Fee Audit. Nilai koefisien unstandardized beta -108.951 merupakan nilai jalur p2. Besarnya nilai e1 = $\sqrt{(1 - 0.057)} = 0.971$ dan besarnya nilai e2 = $\sqrt{(1 - 0.134)} = 0.930$.

e1 = 0.971



Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa Kualitas Audit tidak dapat berpengaruh langsung ke Manajemen Laba dan dapat berpengaruh langsung yaitu dari Kualitas Audit ke Fee Audit (sebagai intervening) lalu ke Manajemen Laba. Besarnya pengaruh langsung adalah -108.951 sedangkan pengaruh tidak langsung harus dihitung dengan mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu $(-108.951) \times (3.157) = -343.958$ atau total pengaruh Kualitas Audit ke Manajemen Laba = $-0.040 + ((-108.951 \times 3.157) = -343.998$

Hitung standar error dari koefisien indirect effect (S_{p2p3})

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2 Sp2^2 + p2^2 Sp3^2 + Sp2^2 Sp3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(3.157)^2 \cdot (33.129)^2 + (-108.951)^2 \cdot (0.000)^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(9.967) \cdot (1097.530)}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{10939.081}$$

$$Sp2p3 = 104.590$$

Berdasarkan hasil $Sp2p3$ ini kita dapat menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{p2 p3}{Sp2 p3} = \frac{-343.958}{104.590} = -3.288$$

Oleh karena nilai t hitung = -3.288 lebih < dari t tabel dengan tingkat signifikan 0.05 yaitu sebesar 1.666, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi -343.958 tidak signifikan yang berarti tidak ada pengaruh mediasi Fee Audit dalam hubungannya Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba.

Pengaruh Kualitas Audit dan Fee Audit terhadap Manajemen Laba

Hasil penelitian pada pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Kualitas Audit dan Fee Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Pada kualitas audit hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2005) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa KAP baik yang big four maupun non big four tidak bisa memperkecil kesempatan pihak manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba. Hasil sejalan dengan penelitian Siregar (2005) yang mengindikasikan bahwa ukuran KAP mungkin bukan merupakan proxy kualitas audit yang tepat di Indonesia.

Dan pada fee audit hasil ini menunjukkan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan masih tetap berada pada jalur yang sesuai atau dengan kata lain tidak melanggar PSAK. Sehingga ada atau tidaknya praktik manajemen laba di dalam suatu perusahaan tidak memiliki hubungan besar kecilnya fee audit yang diberikan kepada auditor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Cyntia (2014) dimana manajemen laba tidak memiliki hubungan terhadap fee audit.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Fee Audit

Hasil penelitian bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit, Diketahui dari hasil uji t menunjukkan bahwa p value sig (0,02) < level of sig (0,05) yang berarti diterima. Hal ini menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh signifikan terhadap Fee Audit, maka dapat disimpulkan semakin tinggi Kualitas Audit yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula Fee Audit yang diterima oleh auditor. Karena KAP yang lebih besar dengan biaya audit yang lebih tinggi cenderung memberikan jasa audit yang berkualitas. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartadi (2009) menyatakan bahwa Fee memang secara signifikan mempengaruhi Kualitas Audit. Penelitian ini juga mendukung penelitian Prima dan Susanti (2013) mereka menyatakan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel Fee Audit terhadap kualitas audit.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba Dengan Fee Audit Sebagai Variabel Intervening

Fee audit dalam model penelitian ini tidak menjadi mediasi hubungan antara kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI. Variabel fee audit tidak mengakibatkan variabel kualitas audit mempengaruhi variabel manajemen laba secara langsung. Hal ini diketahui dari hasil uji analisis jalur bahwa nilai t statistik pengaruh mediasi = $-3.288 <$ dari t tabel dengan tingkat signifikan 0.05 yaitu sebesar 1.666, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi -343.958 tidak ada pengaruh mediasi Fee Audit dalam hubungannya Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba. Dengan demikian semakin tinggi fee audit yang diterima oleh auditor tidak mempengaruhi seorang manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Uji F diperoleh p value sig (0,130) > level of sig (0,05). Hal ini berarti bahwa Kualitas Audit, Fee Audit secara simultan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
2. Berdasarkan Uji t menunjukkan bahwa p value sig (0,02) < level of sig (0,05) Hal ini menyatakan bahwa Kualitas Audit berpengaruh terhadap Fee Audit.
3. Berdasarkan dari hasil uji analisis jalur bahwa nilai t statistik pengaruh mediasi adalah $-3.288 <$ dari t tabel dengan tingkat signifikan 0.05 yaitu sebesar 1.666, disimpulkan bahwa koefisien mediasi -343.958 tidak signifikan. Hal ini berarti tidak ada pengaruh mediasi Fee Audit dalam hubungannya Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba.

REFERENSI

- Bangun, Prima dan Susanti dan Malem Ukur Tarigan, 2013. "Pengaruh Kompetensi, Etika, Dan Fee Audit Terhadap Kualitas Audit" Jurnal Akuntansi, Volume 13, Nomor 1, April 2013 : 803-832

- DeAngelo, Linda Elizabeth. "Auditor Size and Audit Quality". *Journal of Accounting and Economics*. Pp. 183-199. 1981.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 20", Cetakan VI, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Halim Abdul. "Auditing Dasar-Dasa Audit Laporan Keuangan", Edisi Keempat Cetakan Pertama, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2008.
- Hartadi, Bambang. "Pengaruh Fee Audit, Rotasi KAP, dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 2009.
- Nuraini dan Sumarno Zain. "Analisis pengaruh kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap manajemen laba". *Jurnal Maksi*, Vol.7, No.1, Halaman 19-32. 2007.
- Paramitha, Chintia. *I Made Karya Utama*. 2014. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris, Fungsi Internal Audit, dan Praktik Manajemen Laba terhadap Fee Audit Pada Perusahaan Manufaktur di BEI. ISSN: 2302-8556. Universitas Udayana (Unud), Bali.
- Siregar, Sylvia Veronica dan Utama, Siddarta. 2005. "Pengaruh Struktur Kepemilikan ukuran Perusahaan dan praktek Corporate Governance terhadap peneglolaan laba (Earnings Management)". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi ke VIII.
- Sulistyanto, Sri. "Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris". Grasindo. Jakarta. 2008.
- Soediyono, R. 2001. *Analisa Laporan Keuangan : Analisa Ratio*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Triasdini, Himaniar. 2010. Pengaruh CAR, NPL dan ROA Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.



PENGARUH LOAN TO DEPOSIT RATIO, CAPITAL ADEQUACY RATIO, RETURN ON ASSET DAN NON PERFORMING LOAN TERHADAP RETURN SAHAM

Sri Ayem*
Sri Wahyuni

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
 *email: sriayemfeust@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect Loan to Deposit Ratio (LDR) , Capital Adequacy Ratio (CAR) , Return on Assets (ROA) and Non -Performing Loans (NPL) on stock returns banking companies listed in Indonesia Stock Exchange . The Independent variable used is the Loan to Deposit Ratio (LDR) , Capital Adequacy Ratio (CAR) , Return on Assets (ROA) and non- performing loan (NPL) dependent variable stock returns . The purpose of this study was to obtain empirical evidence about the influence of Loan to Deposit Ratio (LDR) , Capital Adequacy Ratio (CAR) , Non Performing Loan (NPL) and Return on Assets (ROA) on stock returns banking companies listed in Indonesia Stock Exchange.

The population in this study is a banking company that is listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) the observation period 2008 to 2012 . Data used in this study was obtained from the Bank's Financial Statements obtained from the website of the Indonesia Stock Exchange and Bank Indonesia . Data analysis method used is multiple linear regression , hypothesis testing while using the simultaneous test (F test) to test the effect of these variables together and t test with a significance level of 5 % to test the effect of partial variables .

Based on the test results, the results obtained simultaneously Loan to Deposit Ratio (LDR) , Capital Adequacy Ratio (CAR) , Return on Assets (ROA) and Non -Performing Loans (NPL) effect on stock returns in banking companies listed in Indonesian Stock Biursa , while partially Loan to Deposit Ratio (LDR) has a positive effect is not significant , its capital adequacy ratio (CAR) and Return on Assets (ROA) and a significant positive effect of Non performing loan (NPL) significant negative effect on stock returns in corporate banking . Predictive ability of the four variables on stock returns is 57.1 % , as indicated by the adjusted R² , while the rest is influenced by other factors not included in our model .

INFO ARTIKEL

Diterima: 25 April 2017
 Direview: 25 April 2017
 Disetujui: 6 Juni 2017
 Terbit: 15 Juni 2017

Keywords:

Stock Return, Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Return on Assets, Non-performing loan

PENDAHULUAN

Pasar modal mempunyai peranan penting sebagai sarana penyaluran dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada perusahaan sebagai pihak yang memerlukan dana. Kebutuhan dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya, maupun peningkatan produksi dapat diperoleh diantaranya melalui emisi saham yang dikenal dengan istilah *go public*. Emisi saham merupakan suatu cara untuk menghimpun dana yang melibatkan masyarakat luas yang berminat sebagai investor. Bagi perusahaan yang menghendaki dana yang lebih permanen akan lebih tepat apabila kebutuhan dana tersebut diperoleh dari pasar modal dengan menjual saham kepada masyarakat akan lebih menguntungkan karena dana yang diperoleh bersifat modal sendiri (*equity*) sehingga tidak terikat dengan pembayaran modal tetap (Tandelilin, 2001).

Pasar modal memungkinkan perusahaan memperoleh sumber pembiayaan jangka panjang yang relatif murah dari instrumen-instrumen keuangan dalam berbagai surat berharga (sekuritas). Melakukan investasi di pasar modal setidaknya harus memperhatikan 2 hal, yaitu: return yang akan diperoleh dari dana yang diinvestasikan dan berapa besar risiko (*risk*) yang harus ditanggungnya. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif, yaitu semakin besar return yang ingin didapat, semakin besar risiko yang harus ditanggung. Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. Return dibedakan menjadi dua, yaitu return realisasi (return yang terjadi atau dapat juga disebut sebagai return sesungguhnya) dan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor) (Jogiyanto, 2003).

Harapan untuk memperoleh return terdapat dalam aset keuangan. Kesediaan investor menyediakan sejumlah dana pada saat ini untuk memperoleh sebuah aliran dana pada masa yang akan datang sebagai kompensasi atas faktor waktu selama dana ditanamkan dan risiko yang ditanggung merupakan sebuah bentuk yang ditunjukkan oleh aset keuangan. Dengan demikian investor dalam aset keuangan juga mengharapkan return yang maksimal. Harapan untuk memperoleh return yang maksimal tersebut dapat direalisasikan dengan melakukan

analisis investasi dalam sahamnya. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi return saham sehingga harapan untuk memperoleh return yang maksimal dapat tercapai. Investor dalam menginvestasikan dananya dalam bentuk saham bertujuan untuk memperoleh stock return sebagai trade off dari risiko yang akan dihadapi. Investasi saham memiliki tingkat risiko yang lebih besar karena *expected return* dari investasi ini sifatnya tidak pasti. Oleh karena itu informasi mengenai return dan risiko dari investasi saham menjadi hal yang sangat penting bagi investor dalam mempertimbangkan suatu investasi (Budialim, 2013). Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah mendatangkan perubahan yang kurang menguntungkan hampir disemua aspek kehidupan bangsa. Pada tahun itu juga pasar modal mengalami guncangan yang cukup berat yang ditandai dengan turunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Dampak lain yang sangat serius juga dialami oleh sektor perbankan yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank pada tahun tersebut dan dibekukannya 10 bank pada tahun berikutnya. Keadaan tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank mengalami penurunan, sehingga menurunkan minat calon investor terhadap saham perusahaan perbankan. Hal ini menyebabkan banyak bank yang lumpuh karena dihantam kredit macet. Pada Seminar Restrukturisasi Perbankan di Jakarta pada tahun 1998 disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja bank, antara lain: 1) Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, 2) Dampak likuidasi bank-bank 1 november 1997 yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah, sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran, 3) Semakin turunnya permodalan bank-bank, 4) Banyak bank-bank tidak mampu memenuhi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah, 5) Manajemen tidak profesional. Laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi yang bersifat fundamental. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah rasio keuangan. Sebelum memutuskan kemana akan berinvestasi calon investor biasanya melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi return saham.

Analisis yang digunakan untuk mengukur nilai saham dapat digunakan dengan analisis fundamental dan analisis teknikal. Penelitian ini mengutamakan pada analisis fundamental yaitu berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan, tentang efektifitas dan efisiensi perusahaan mencapai sasaran. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha menghubungkan return saham dengan faktor-faktor fundamental perusahaan yang tercermin dalam rasio keuangan (Marviana, 2009). Rasio keuangan merupakan rasio yang digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan kelemahan kondisi keuangan perusahaan serta untuk memprediksi return saham di pasar modal. Rasio keuangan merupakan faktor internal perusahaan yang mempengaruhi return saham, faktor internal yang dipakai dalam penelitian ini adalah, Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) dan Non Performing Loan (NPL). Loan To Deposit Ratio (LDR) yaitu perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga (Taswan, 2005). Semakin tinggi nilai LDR, semakin menunjukkan banyak dana yang disalurkan dalam perkreditan sehingga perbankan akan memperoleh laba dari bunga kredit. Hal tersebut akan mempengaruhi penilaian investor dalam mengambil keputusan investasinya, sehingga secara bersamaan akan mempengaruhi permintaan saham di pasar modal yang pada akhirnya mempengaruhi harga saham dan berdampak pada pertumbuhan tingkat return saham (Wongso, 2012). Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain ikut dibiayai dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2005). Apabila nilai CAR semakin tinggi mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat memberikan return yang optimal. Tingkat laba atau profitabilitas yang diperoleh oleh bank ini disebut dengan Return On Asset (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan

atau laba, semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut. Return On Asset (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (Darmawan, 2004 dalam Pahlevie). Bank dalam memberikan return harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Tingginya rasio NPL yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh kepada nilai asset bank dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba, hal itu akan berdampak pada nilai profitabilitas bank itu sendiri. Kredit macet yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk memberikan return, sehingga mengurangi jumlah return yang diberikan oleh suatu bank (Kuspita, 2011). Penelitian ini melanjutkan penelitian dari Zulbetti (2011) dan Kuspita (2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulbetti (2011) dan Kuspita (2011) bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL) menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Perbedaan penelitian ini tidak menggunakan variabel Gross Domestic Product (GDP), Dividen Per Share (DPS), inflasi, biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) dan net interest margin (NIM) dengan menambahkan variabel Non Performing Loan dan Return On Asset (ROA).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Bank

Menurut Taswan (2005:10) bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang berkelebihan dana (surplus spending unit) menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan

yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Jenis-jenis Bank

Kasmir (2013) mengklasifikasikan jenis bank berdasarkan :

a. Bank menurut fungsi, yaitu :

1. Bank sentral merupakan bank yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan di suatu negara. Di Indonesia fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah.
2. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

b. Bank menurut kepemilikan, yaitu :

- 1) Bank persero (bank pemerintah) merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula.
- 2) Bank umum swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula.
- 3) Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi
- 4) Bank asing merupakan bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5) Bank campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia.

c. Kegiatan di bidang devisa yaitu :

- 1) Bank devisa (foreign exchange bank) merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
- 2) Bank non devisa (non foreign exchange bank) merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

d. Bank menurut jenis kantor yaitu :

- 1) Kantor pusat merupakan kantor bank dimana terdapat semua kegiatan perencanaan sampai pengawasan dan biasanya tidak melaksanakan kegiatan operasional sebagaimana kantor lainnya.
- 2) Kantor cabang penuh merupakan kantor bank yang memberikan jasa bank paling lengkap dan biasanya membawahi kantor cabang penuh.
- 3) Kantor cabang pembantu merupakan kantor bank yang hanya melayani sebagian dari kegiatan cabang penuh.
- 4) Kantor kas merupakan kantor bank paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller.

Analisis Fundamental

Analisis fundamental merupakan analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan atau data fundamental (misalnya laba, penjualan, aktiva, modal, hutang, dll) (Jogiyanto 2003:89). Analisis fundamental menyatakan bahwa setiap investasi saham mempunyai landasan kuat yang disebut nilai intrinsik yang dapat ditentukan melalui suatu analisis yang sangat hati-hati terhadap kondisi perusahaan pada kondisi sekarang dan prospeknya pada masa yang akan datang.

Analisis Rasio Keuangan

Menurut Simamora (2000 dalam Nugroho) analisis rasio menunjukkan hubungan di antara pos-pos yang terpilih dari data laporan keuangan. Rasio memperlihatkan hubungan matematis di antara satu kuantitas dan kuantitas lainnya. Hubungan ini dinyatakan dalam presentase, tingkat, maupun proporsi tunggal. Analisis rasio merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial. Rasio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor yang satu dengan faktor yang lain dari suatu laporan finansial.

Loan To Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga (Taswan,2010). Menurut Dendawijaya (2005) Loan to Deposit Ratio (LDR) menunjukkan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi LDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah LDR menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit. Jika rasio LDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka return yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio LDR adalah 80% hingga 110%. Menurut ketentuan Bank Indonesia rasio Loan To Deposit Ratio dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Kredit yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Menurut Dendawijaya (2005:115) Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain ikut dibiayai dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain.

CAR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Inti} + \text{Modal Pelengkap}}{ATMR} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba, semakin besar nilai Return On Asset (ROA) suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset (Dendawijaya,2005:116). Return OnAsset (ROA) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit (Taswan, 2010:166), sedangkan menurut Darmawan,2004 dalam Pahlevie NPL adalah rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur.

Bank Indonesia menetapkan nilai NPL maksimum adalah sebesar 5%. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia rasio Non Performing Loan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPL = \frac{\text{Jumlah kredit bermasalah}}{\text{total Kredit}} \times 100$$

Pengertian Pasar Modal

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya.

Pengertian Saham

Saham (stock atau share) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.

Return Saham

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (Jogiyanto,2003:199). Menurut Samsul (2006: 291) return adalah pendapatan

yang dinyatakan dalam persentase dari modal awal investasi.

Menurut Jogiyanto (2003) Return saham dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R_t = \frac{P_t - P(t-1)}{P(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

- R_t : Return saham
- P_t : Harga saham pada periode tertentu t
- P_{t-1} : Harga saham pada periode t-1

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampling

Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah keseluruhan dari sekumpulan elemen atau objek dan subjek yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang diminati oleh peneliti untuk dipelajari, diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut (Sugiyono, 2013). Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu dan tujuan untuk mendapatkan sampel presentatif. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampelnya adalah:

- a) Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2012
- b) Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten dan disampaikan kepada Bank Indonesia selama periode 2008-2012.
- c) Perusahaan perbankan yang menyajikan secara lengkap laporan keuangan dan rasio-rasio yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 2008-2012.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 19 bank selama periode 2008-2012, sehingga jumlah sampel yang akan diteliti selama 5 tahun sebanyak 95.

Tabel 1
Prosedur pemilihan sampel

Kriteria Bank	Sampel
Bank yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia dengan tanggal IPO sebelum tahun 2008	25
– Bank yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan secara lengkap	(6)
Jumlah sampel bank dalam 1 tahun	19
Periode pengamatan 5 tahun = 5 x 19, sehingga jumlah amatan	95

Jumlah bank yang sesuai dengan karakteristik sampel ada 19 bank sehingga selama periode tahun 2008-2012 sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95, yang didapat dari perhitungan bank dikalikan periode tahun yang akan diteliti, yakni 19 bank dikalikan 5 tahun, sehingga dihasilkan sampel sebanyak 95.

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua (2) variabel, yaitu sebagai berikut :

- a) Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini yaitu return saham. Return saham adalah hasil investasi surat berharga (saham) yang berupa capital gain (loss) yaitu selisih antara harga saham saat ini dengan harga saham periode sebelumnya.

b) Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yaitu Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), dan Non Performing Loan (NPL) :

1. Loan To Deposit Ratio (LDR) merupakan perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga.
2. Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat

berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya, 2005:116).

3. Return On Asset (ROA) mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya, semakin besar rasio ROA maka semakin baik pula kinerja bank tersebut (Taswan,2010:167).
4. Non Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit (Taswan,2010:166).

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel

Indikator	Definisi Indikator	Pengukuran
Return Saham (Y)	Hasil investasi surat berharga (saham) yang berupa capital gain (loss) yaitu selisih antara harga saham saat ini dengan harga saham periode sebelumnya.	Persen
Loan To Deposit Ratio(x2)	Rasio perbandingan antara kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Perhitungan rasio LDR sesuai dengan rumus di laporan keuangan bank yang dipublikasikan.	Persen
Capital Adequacy Ratio (x1)	Rasio antara modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko. Perhitungan rasio CAR sesuai dengan rumus di laporan keuangan bank yang dipublikasikan.	Persen
Return On Asset (x3)	Rasio antara laba sebelum pajak yang disetahunkan dibagi dengan total asset. Perhitungan rasio ROA sesuai dengan rumus di laporan keuangan bank yang dipublikasikan.	Persen
Non Performing Loan (x4)	Rasio antara jumlah kredit yang bermasalah dengan total kredit. Perhitungan rasio NPL sesuai dengan rumus di laporan keuangan bank yang dipublikasikan.	Persen

Teknik Analisis Data

a) Uji Regresi

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (Ghozali, 2011). Statistik untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan rumus :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Keterangan :

- Y : Return saham
- a : Konstanta
- b1-b4 : Koefisien regresi variabel independen
- x1 : Loan To Deposit Ratio (LDR)
- x2 : Capital adequacy Ratio (CAR)
- x3 : Return On Asset (ROA)
- x4 : Non Performing Loan (NPL)
- e : Error

b) Uji Hipotesis

1) Uji Determinasi (R^2)

Dalam uji linier berganda, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), dan Non Performing Loan (NPL) terhadap variabel terikat return saham. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi R^2 yang merupakan besaran non negatif. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan 1. Jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. Bila $r = +1$, atau mendekati 1 maka korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat (Ghozali, 2011).

2) Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model, mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), dan Non Performing Loan (NPL) secara bersama-sama terhadap return saham. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0.05 , maka hipotesis diterima. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen dan sebaliknya.

3) Uji Statistik t

Uji t (t-test) dilakukan untuk menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik.

Penyusunan hipotesis sesuai bab II adalah sebagai berikut:

HO1 : Tidak ada pengaruh antara Loan To Deposit Ratio terhadap return saham

Ha1 : Ada pengaruh antara Loan To Deposit Ratio terhadap return saham

HO2 : Tidak ada pengaruh antara Capital Adequacy Ratio terhadap returnsaham

Ha2 : Ada pengaruh antara Capital Adequacy Ratio terhadap return saham

HO3 : Tidak ada pengaruh antara Return On Asset terhadap return saham

Ha3 : Ada pengaruh antara Return On Asset terhadap return saham

HO4 : Tidak ada pengaruh antara Non Performing Loan terhadap return saham

Ha4 : Ada pengaruh antara Non Performing Loan terhadap returnsaham

Dasar pengambilan keputusan:

Jika t hitung $> t$ tabel, maka H_0 tidak didukung, H_a didukung atau

Jika t hitung $< t$ tabel, maka H_0 didukung, H_a tidak didukung, atau

Berdasarkan probabilitas yaitu dengan membandingkan nilai dengan α (0,05)

yaitu:

Jika $sig < 0,05$ maka H_0 tidak didukung, H_a didukung.

Jika $sig > 0,05$ maka H_0 didukung, H_a tidak didukung.

c) Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat berdasarkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2011:105).

Dasar pengambilan keputusan:

a) Besaran VIF dan tolerance, suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas adalah:

1) Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1.

2) Mempunyai angka tolerance mendekati 1.

Uji Autokorelasi

Menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011:111).

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi:

Hipotesis nol	keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d - 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi positif dan negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4-du$

Uji Heterokedastisitas

Menurut Udayana (2008) Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi Heterokedastisitas.

Uji Normalitas

Menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Return Saham	95	-1524.00	460.00	6.0662	174.30718
LDR	95	5.46	102.20	76.7046	15.59355
CAR	95	4.42	2024.00	181.9098	501.58222
ROA	95	.07	711.00	28.7378	109.50521
NPL	95	.12	178.00	14.5349	37.51857
Valid N (listwise)	95				

Berdasarkan tabel statistik deskriptif dapat dilihat bahwa dengan N= 95 waktu amatan, variabel Return saham mempunyai nilai minimum -1524,00 dan nilai maksimum 460,00, sementara nilai deviasistandar (standard deviation) sebesar 174,30718 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 6,0662. Loan To Deposit Ratio (LDR) mempunyai nilai minimum 5,46 dan nilai maksimum 102,20, sementara nilai standar deviasi (standard deviation) sebesar 15,59355 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 76,7046. CAR mempunyai nilai minimum 4,42 dan

nilaimaksimum 2024,00, sementara nilai standar deviasi (standard deviation) sebesar 501,58222 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 181,9098. ROA mempunyai nilai minimum 0,07 dan nilai maksimum 711,00, sementara nilai standar deviasi (standard deviation) sebesar 109,50521 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 28,7378. NPL mempunyai nilai minimum 0,12 dan nilai maksimum 178,00, sementara nilai standar deviasi (standard deviation) sebesar 37,51857 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 14,5349.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Tabel 4
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LDR	.945	1.059
CAR	.262	3.819
ROA	.502	1.993
NPL	.294	3.398

a. Dependent Variable: Return Saham

Berdasarkan tabel, menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan multikolinieritas pada variabel LDR, CAR, ROA dan NPL karena VIF tidak lebih besar dari 10 dan nilai tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa dalam model ini tidak terdapat masalah multikolinieritas antara variabel bebas karena nilai tolerance berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10.

b). Uji Autokorelasi

Tabel 5
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.767 ^a	.589	.571	114.21717	2.216

a. Predictors: (Constant), NPL, LDR, ROA, CAR

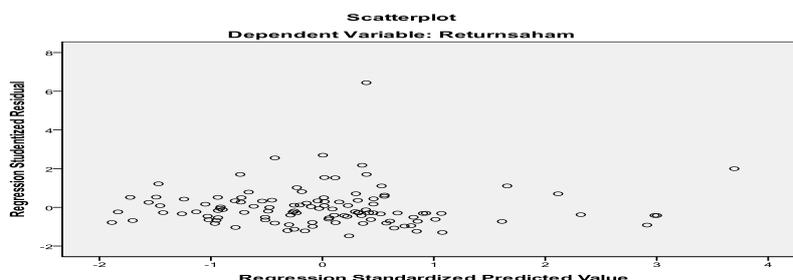
b. Dependent Variable: Return Saham

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel, dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson 2,216 lalu hasil ini dibandingkan dengan nilai dl dan du pada tabel Durbin-Watson. Penelitian ini menggunakan jumlah sampel 95, dengan variabel independen 4 maka diperoleh nilai du sebesar 1,566 dan dl 1,726. Syarat penelitian

untuk dapat dinyatakan bebas autokorelasi adalah $du < d < (4-du)$, dari hasil nilai hitung tersebut maka tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

c) Uji Heteroskedastisitas

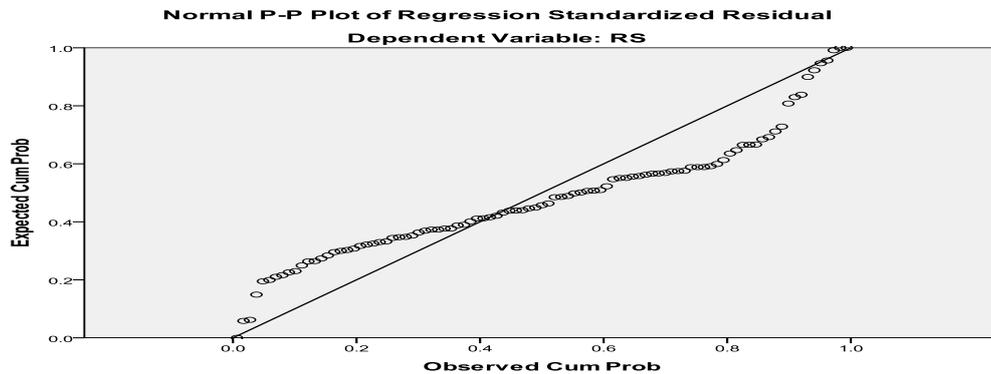


Berdasarkan gambar scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada

sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi

pengaruh return saham berdasarkan masukan Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) dan Non Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Performing Loan (NPL).

c) Uji Normalitas



Berdasarkan gambar P-P plot standardized residual menunjukkan pola data terdistribusi normal, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 6
Uji Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	65.634	31.738		.107	.915
	LDR	.143	.777	.013	.184	.855
	CAR	.944	.546	.715	3.141	.002
	ROA	1.331	.152	.836	8.762	.000
	NPL	-.643	.579	-.484	-.294	.160

a. Dependent Variable: Return saham
Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan tabel, dengan memperhatikan angka yang berada pada kolom Unstandardized Coefficient Beta, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{Return Saham} = 65,634 + 0,143 \text{ LDR} + 0,944 \text{ CAR} + 1,331 \text{ ROA} - 0,643 \text{ NPL}$$

Dari persamaan regresi di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Nilai konstanta persamaan di atas adalah sebesar 65,643. Angka tersebut menunjukkan return saham yang diperoleh oleh bank sebesar 65,643 bila LDR (X₁), CAR (X₂), ROA (X₃) dan NPL (X₄) dianggap konstan.

b) Variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) memiliki nilai koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar (+) 0,143. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa LDR terhadap return saham berpengaruh positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan LDR sebesar 1%, maka return saham pada bank akan naik sebesar 0,143 dengan asumsi variabel independen lain dianggap konstan.

c) Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai koefisien yang positif yaitu sebesar (+) 0,944. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa CAR terhadap return saham berpengaruh positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan CAR sebesar 1%, maka return saham akan

menyebabkan kenaikan nilai return pada bank sebesar 0,944 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan.

- d) Variabel Return On Asset(ROA) memiliki nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar(+)1,331 Nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini berarti setiap kenaikan tingkat ROA sebesar 1% maka return saham pada bank akan mengalami kenaikan sebesar 1,331 dengan asumsi bahwa

variabel independen yang lain dianggap konstan.

- e) Variabel Non Performing Loan (NPL) memiliki nilai koefisien regresi yang negatif yaitu sebesar -0,643. Nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap return saham. Hal ini berarti setiap kenaikan tingkat NPL sebesar 1% maka return saham pada bank akan mengalami penurunan sebesar 0,643 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan.

Uji Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.767 ^a	.589	.571	114.21717	2.216

a. Predictors: (Constant), NPL, LDR, ROA, CAR

b. Dependent Variable: Return Saham

Sumber : Data sekunder diolah

Dari tabel dapat diketahui bahwa nilai adjusted R² adalah 0,571. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 57,1% return saham dari bank dipengaruhi oleh variasi dari keempat variabel independen yang digunakan, yaitu Loan To

Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio(CAR), Return On Asset (ROA) dan Non Performing Loan(NPL), sedangkan sisanya sebesar 42,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

b) Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Tabel 8
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1681900.790	4	420475.197	32.231	.000 ^a
	Residual	1174100.626	90	13045.563		
	Total	2856001.415	94			

a. Predictors: (Constant), NPL, LDR, ROA, CAR

b. Dependent Variable: Return Saham

Sumber : Data sekunder diolah

Pada tabel menunjukkan angka hasil pengujian model menghasilkan F hitung sebesar 32,231, sementara itu nilai pada tabel distribusi nilai F dengan derajat bebas (4:95) pada taraf signifikansi 5% adalah 2,472927. Oleh karena F hitung 32,231 > F tabel 2,472927 maka hipotesis

terdukung, dengan tingkat signifikansi 0,000 (jauh lebih kecil dari 0,05) artinya antara LDR, CAR, NPL dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap return saham pada perusahaan perbankan.

c) Uji Statistik t

Tabel 9
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	65.634	31.738		.107	.915
LDR	.143	.777	.013	.184	.855
CAR	.944	.546	.715	3.141	.002
ROA	1.331	.152	.836	8.762	.000
NPL	-.643	.579	-.484	-.294	.160

a. Dependent Variable: Return saham
Sumber : Data sekunder diolah

- 1) Berdasarkan pengujian parsial (Uji-t) diperoleh hasil bahwa Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar (+) 0,184 dengan tingkat signifikansi 0,855 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai t hitung < t tabel (0,184 < 1,986674), maka hipotesis pertama yang menyatakan Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif, terdukung. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Padli (2011), Zulfa (2013) dan Anisma (2012) bahwa LDR tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap return saham. Dalam penelitian Padli (2011), Loan To Deposit Ratio tidak berpengaruh terhadap return saham dikarenakan bank tidak menggunakan LDR sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyalurkan dana dalam perkreditan, sehingga tidak mempengaruhi naik turunnya return pada bank.
- 2) Berdasarkan pengujian parsial (Uji-t) diperoleh hasil bahwa Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar (+) 3,141 dengan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari taraf signifikansi dan nilai t hitung > t tabel (3,141 > 1,986674), maka hipotesis kedua yang menyatakan Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif, terdukung. Penelitian ini mendukung penelitian Khaddafi (2008), Wongso (2012), Khaddafi (2008), Zulbetti (2011) dan Gunawan (2012) bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) pengaruh positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Semakin tinggi CAR, maka bank semakin solvable. Bank yang memiliki CAR yang tinggi, berarti bank memiliki modal yang cukup kuat guna menjalankan usahanya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang diperolehnya. Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi berarti bank mempunyai kemampuan untuk mengatasi kemungkinan kerugian akibat perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. Selain itu, masyarakat dan investor akan percaya terhadap kemampuan permodalan bank dan dana yang diserap dari masyarakat meningkat yang akhirnya akan meningkatkan return saham (Siamat, 2005:254).
- 3) Berdasarkan pengujian parsial (Uji-t) diperoleh hasil bahwa Return On Asset (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar (+) 8,762 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai t hitung > t tabel (8,762 > 1,986674), maka hipotesis ketiga yang menyatakan Return On Asset (ROA) berpengaruh positif, terdukung. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2007), Khaddafi (2008), Zulfa (2013), Wongso (2012), Gunawan (2012),

Gantino dan Maulana (2012) yang menyatakan bahwa ROA mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Bank dalam memberikan return berdasarkan alokasinya pada tingkat ROA yang diperoleh dari tahun lalu, karena tingginya ROA menunjukkan laba bank yang stabil dengan kualitas aktiva sudah baik dan manajemen laba yang baik, hal ini yang membuat bank lebih banyak memberikan return.

Berdasarkan pengujian parsial (Uji-t) diperoleh hasil bahwa Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar (-) 0,294 dengan tingkat signifikansi 0,160 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 dan nilai t hitung < t tabel (-0,294 < 1,986674), maka hipotesis keempat yang menyatakan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif, terdukung. Hasil penelitian ini mendukung dari hasil penelitian Khaddafi (2008), Gunawan (2012), Kuspita (2011) dan Zulbetti (2011) yang menyatakan bahwa NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap return saham. Dalam penelitian Zulbetti (2011) menyebutkan bahwa NPL menunjukkan nilai yang cukup tinggi namun bank memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) yang cukup tinggi dan melebihi dari batas minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sehingga CAR masih dapat membantu menutup risiko kredit yang diakibatkan oleh kredit macet. Oleh karena itu kenaikan NPL secara langsung tidak mengakibatkan menurunnya return dan sebaliknya penurunan NPL tidak mengakibatkan menaiknya return (Nasser, 2003).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Return On Asset dan Non Performing Loan terhadap Return Saham pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012, baik regresi berganda, secara simultan maupun parsial. Hasil pengujian analisis regresi berganda LDR = 0,143, CAR = 0,944, ROA = 1,331 dan NPL = -0,643. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa

Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), dan Non Performing Loan (NPL) yang ada berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel return saham pada perusahaan perbankan. Hasil pengujian secara parsial Loan To Deposit Ratio (LDR) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap return saham. Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap return saham. Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham pada perusahaan perbankan.

IMPLIKASI

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda, variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan perbankan adalah Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA), maka variabel tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menilai kondisi bank dalam memperoleh laba. Jika permodalan bank meningkat dan manajemen perusahaan dapat memaksimalkan tingkat kemampulabaan yang berasal dari asetnya (kualitas aktiva produktif), maka laba yang diperoleh perusahaan dapat meningkat. Peningkatan laba tersebut mempengaruhi ekspektasi investor dalam membeli saham perusahaan bank, sehingga berdampak pada meningkatnya return saham yang diperoleh investor.

SARAN

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, dan merumuskan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank, berdasarkan hasil penelitian ini variabel Loan To Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap return saham, maka bank dapat mengevaluasi penyaluran kredit yang berasal dari dana pihak ketiga dan kredit yang bermasalah agar biaya kerugian atas kredit bermasalah tersebut

tidak terlalu besar dan portofolio penyaluran kredit dapat dikoreksi berdasarkan kemampuan keuangan pihak debitur sehingga bank masih dapat mengoptimalkan kinerjanya tersebut untuk memperoleh laba. Peningkatan laba akan mempengaruhi ekspektasi investor untuk membeli saham bank tersebut sehingga akan berpengaruh pada return saham yang diperoleh investor.

2. Bagi pihak investor, berdasarkan penelitian ini bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap return saham, maka investor yang akan berinvestasi saham di perusahaan perbankan agar dapat mempertimbangkan besarnya nilai Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Return On Asset (ROA) yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia dalam memulai berinvestasi saham perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena variabel tersebut secara empiris terbukti mempengaruhi return saham pada perusahaan perbankan .
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sampel yang digunakan agar hasilnya lebih baik terhadap sampel yang dipilih, serta menambah periode penelitian.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini hanya diwakili oleh empat variabel yaitu Loan To Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) dan Non Performing Loan (NPL) sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh return saham pada perusahaan perbankan, sedangkan masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi return saham, seperti inflasi, nilai tukar uang dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

Anisma, Yuneita. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI. Jurnal: Sosial Ekonomi Pembangunan. Universitas Riau. Dipublikasikan.

Ardiani, Anita. 2007. Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Perubahan Harga Saham pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Skripsi: UNNES. Dipublikasikan

Budialim, Giovanni. 2013. Pengaruh Kinerja dan Resiko Terhadap Return Saham Perusahaan Consumer Good Di BEI Periode 2007-2011. Jurnal: Ekonomika dan Bisnis. Universitas Surabaya. Vol.2.No.1

Brigham, Eguene F dan Joel F. Houston. 2006. Manajemen keuangan. Edisi Kedelapan. Jakarta: Erlangga.

Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia. Bogor.

Darmadji dan Fakhruddin, Hendy. 2006. Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab. Salemba Empat, Jakarta.

Gunawan, Tri. 2012. Pengaruh Rasio Camel, Inflasi dan Nilai Tukar Uang Terhadap Return Saham (Studi Empiris Bank Yang Terdaftar Di BEI). Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang. Dipublikasikan.

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Cetakan Kelima. Badan Penerbit: Universitas Diponegoro Semarang.

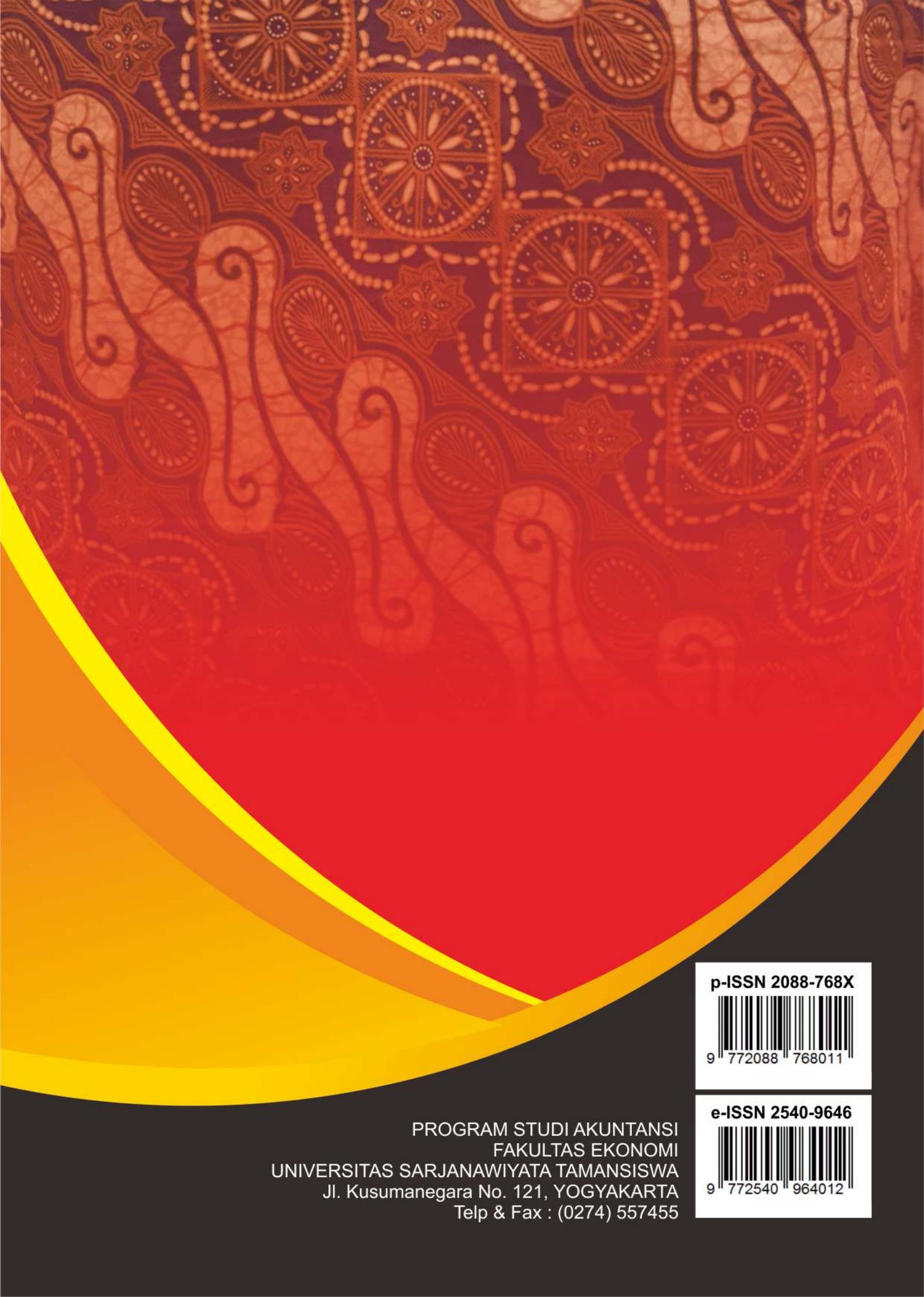
Gantino Rilla Dan Maulana Fahri. 2012. Pengaruh ROA, CAR dan LDR Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2011. Jurnal: Akuntansi. Universitas Esa Unggul. Dipublikasikan.

Jogiyanto. 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : BPFE.

Kuspita, Maya. 2011. Pengaruh CAR, LDR, NPL, BOPO, dan DPS Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa

- Efek Indonesia. Skripsi: Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Dipublikasikan.
- Kasmir.2013. Dasar-Dasar Perbankan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kurniadi, Rintisya. 2012. Pengaruh CAR, NIM dan LDR Terhadap Return Saham Perbankan Indonesia. Jurnal: Akuntansi. Universitas Negeri Semarang. Dipublikasikan.
- Khaddafi,Muaammar. 2008. Hubungan Rasio Camel Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI. Jurnal: Akuntansi. Universitas Malikulsaleh. Dipublikasikan.
- Marviana, Ratna Dina.2009. Pengaruh Faktor Fundamental Terhadap Return Saham Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.Tesis: Universitas Sumatera Utara.Dipublikasikan.
- Muljono,Teguh Pudjo. 1999. Analisis Laporan Keuangan Untuk Perbankan. Jakarta: Djembatan.
- Nugroho, Lukman Chakim. 2012. Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO,dan LDR Terhadap Tingkat Profitabilitas Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011). Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang. Dipublikasikan.
- Nasser, ETTY M, 2003. Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan Rasio CAMEL serta Pengaruhnya terhadap Harga Saham, media riset akuntansi, auditing dan informasi vol. 3, desember, 217-236.
- Padli. 2011. Pengaruh CAR, ROA, dan LDR Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Di BEI. Jurnal: Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang. Dipublikasikan.
- Pahlavie, Nu'mahHamzah. 2009. Analisis Pengaruh CAR, LDR, NIM, BOPO dan EAQ Terhadap Perubahan Laba (Studi Kasus Pada Bank Umum Di Indonesia Periode 2004-2007). Tesis: Universitas Diponegoro Semarang. Dipublikasikan.
- PSAK Nomor 31 Dalam Standar Akuntansi Keuangan (1999: 31.1) Pengertian Bank.
- Rusdiana, Nana. 2012. Analisis Pengaruh CAR, LDR, NIM, NPL, BOPO, dan DPK Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Kasus Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2011). Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang. Dipublikasikan.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. Cetakan Kesatu. Bandung: CV Alfabeta.
- Santoso, Singgih. 2000. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Samsul , Mohamad. 2006. Pasar Modal dan Teori Portofolio. Jakarta : Erlangga
- Sunaryah. 2004. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004 Perihal Pedoman Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (CAMELS Rating), Bank Indonesia, Jakarta.
- Siamat, Dahlan .2005. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 792 Tahun 1990 Pengertian Bank.
- Taswan. 2010. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi. Yogyakarta. UPP STIM YKPN Yogyakarta.

- Tandelilin, Eduardus. 2001. Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Yogyakarta: BPFE.
- Udayana, IBN. 2008. Pelatihan Statistik dengan SPSS, V 12.00. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.
- UU. No 10 tahun 1998 tentang Perbankan RI
- Widodo, Saniman. 2007. Analisis Pengaruh Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Pasar Terhadap Return Saham Syariah Dalam Kelompok Islamic Index (JII) Tahun 2003-2005. Tesis: Universitas Diponegoro Semarang. Dipublikasikan.
- Wongso, Ryan Alexander. 2012. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Pada Bank Mandiri Di Makassar (Periode 2005 – 2010). Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar. Dipublikasikan.
- [www. Idx.co.id](http://www.idx.co.id) diakses tanggal 04 Februari 2014 pukul 11.00
- Zulfa, Ingga. 2013. Pengaruh Rentabilitas, Likuiditas, Kecukupan Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. Skripsi: Universitas Negeri Padang. Dipublikasikan.
- Zulbetti, Rilla. 2012. Pengaruh Rasio-Rasio Camel dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2000-2010). Jurnal: Akuntansi.



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
Jl. Kusumanegara No. 121, YOGYAKARTA
Telp & Fax : (0274) 557455

p-ISSN 2088-768X



9 772088 768011

e-ISSN 2540-9646



9 772540 964012